



LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

LKjIP
2018



**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SLEMAN**

(0274) 866039



bkad@slemankab.go.id



Jl. Parasamya No.03, Beran, Tridadi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55511



LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

LKjIP
2018



**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SLEMAN**

(0274) 866039 

bkad@slemankab.go.id 

Jl. Parasamya No.03, Beran, Tridadi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55511

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas penyusunan "**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Keuangan dan Aset Daerah 2018**".

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 yang berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman sebagai salah satu entitas pelaporan di Pemerintah Kabupaten Sleman sudah barang tentu wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2018.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan dan Aset Daerah 2018 diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, penyempurnaan dokumen perencanaan di masa datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan di masa datang dan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak.

Sleman,
Kepala BKAD



Harda Kiswaya, SE., MM
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19640126 199303 1 004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR GAMBAR iv

DAFTAR TABEL v

BAB I PENDAHULUAN 1

 A. Maksud dan Tujuan Laporan 1

 B. Tugas Organisasi 1

 C. Permasalahan dan Tantangan 3

BAB II PERENCANAAN KINERJA..... 6

 A. Rencana Strategis (Renstra) 6

 B. Rencana Kerja Tahunan (Renja) SKPD 2017 9

 C. Penetapan Kinerja (Tapkin) SKPD 2018 10

 D. Indikator Kinerja Utama 10

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 12

 A. Capaian Kinerja Organisasi 12

 B. Pengukuran Capaian Indikator Kegiatan 30

 C. Realisasi Anggaran 32

 C.1. Realisasi Anggaran Belanja dan Pendapatan BKAD 32

 C.2. Realisasi Anggaran Belanja dan Pendapatan PPKD 34

BAB IV PENUTUP 44

LAMPIRAN 45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Wakil Bupati Sleman, Dra. Hj. Sri Muslimatun, M.Kes Menerima Anugrah Dana Rakca dari Kementerian Keuangan RI	19
Gambar 3.2 Bupati Sleman bersama dengan Ketua DPRD Sleman menerima Laporan Hasil Pemeriksaan BPK	20
Gambar 3.2 Loker SPTPD Online Kantor BKAD Kabupaten Sleman	25

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Kategori Capaian	13
Tabel 3.2 Indikator Sasaran 1	14
Tabel 3.3 Indikator Sasaran 2	15
Tabel 3.4 Indikator Sasaran 3	22
Tabel 3.5 Program yang Mendukung Kualitas Kualitas Pelayanan Publik	27
Tabel 3.6 Indikator Sasaran 4	27
Tabel 3.7 Indikator Sasaran 5	29
Tabel 3.8 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2017 dengan Target Tahun 2018	30
Tabel 3.9 Realisasi Anggaran BKAD 2018	33
Tabel 3.10 Pendapatan BKAD 2018	33
Tabel 3.11 Realisasi Anggaran PPKD 2018	34
Tabel 3.12 Pendapatan PPKD 2018	35
Tabel 3.13 Rincian Belanja Langsung BKAD Kab Sleman Tahun 2018	36

BAB I

PENDAHULUAN

A. Maksud dan Tujuan Laporan

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 yang berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada BKAD sebagai instansi pemerintah dengan mendasarkan pada suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Akuntabilitas merupakan suatu keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan visi misi dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna.

Secara ringkas maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut :

1. Sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
2. Sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja.
3. Sebagai bahan penyempurnaan dokumen perencanaan di masa datang.
4. Sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan di masa datang.
5. Sebagai bahan penyempurnaan kebijakan yang diperlukan.

B. Tugas Organisasi

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) mempunyai kedudukan strategis dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset daerah Pemerintah Kabupaten Sleman. BKAD sebagai Perangkat Daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna

anggaran/barang disisi lain BKAD juga sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dimana kepala SKPKD mendapat limpahan kuasa pengelolaan keuangan daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dari pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah yaitu Bupati Sleman.

Tugas dan fungsi BKAD selaku SKPD diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 dan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 101 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Fungsi dan Tata Kelola Badan Keuangan dan Aset Daerah. Adapun tugas PPKD diatur dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman nomor 7 tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Tugas PPKD sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman nomor 7 tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah :

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah.
2. Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD.
3. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
4. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD).
5. Menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
6. Melakukan pengendalian atas penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati.
7. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun kewenangan PPKD sebagai BUD adalah sebagai berikut :

1. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD.
2. Mengesahkan DPA-SKPD.
3. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD.
4. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD.
5. Melaksanakan pemungutan pajak daerah.
6. Mengusahkan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD.
7. Melakukan pengendalian dan validasi atas bukti pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh SKPD.
8. Menyimpan dan mengelola uang/kas daerah.

9. Menetapkan SPD.
10. Melakukan pembayaran atas beban rekening kas daerah berdasarkan permintaan pengguna anggaran.
11. Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah.
12. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.
13. Menyajikan informasi keuangan daerah.
14. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

C. Permasalahan dan Tantangan

Mayoritas pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2018 dan pada tahun anggaran sebelumnya dapat dikatakan merupakan pelaksanaan tugas dan fungsi BKAD sebagai SKPKD/PPKD bahkan kegiatan kesekretariatanpun dilaksanakan dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi BKAD sebagai SKPKD/PPKD. Berdasarkan pengalaman saat ini dan masa lalu permasalahan penyelenggaraan tugas dan fungsi BKAD diantaranya :

1. Beberapa sistem informasi penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi terutama sistem informasi belum sepenuhnya bekerja dengan optimal. Adanya sistem pengelolaan keuangan yang baru pada tahap-tahap awal penerapan integrasi antar sistem yang dibangun secara terpisah sebelumnya, masih harus lebih banyak melakukan orientasi dan penyesuaian. Kondisi tersebut memerlukan sumberdaya yang lebih besar baik berupa waktu, tenaga, konsep pemikiran, maupun biaya untuk mendapatkan bentuk manajemen yang sesuai dengan tujuan.
2. Adanya Instruksi Bupati Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam rangka menindaklanjuti SE Mendagri Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah perlu upaya lebih besar lagi agar penerapan kebijakan tersebut tidak menjadi kendala baik pada penyerapan anggaran dan pencapaian target pendapatan. Implementasi kebijakan transaksi non tunai perlu terus dilakukan perbaikan baik dari sisi pembatasan nominal maupun teknis terkait sistem dan prosedur penyelesaian transaksi non tunai baik dari pengeluaran maupun penerimaan pendapatan. Disamping itu upaya sosialisasi terus dilakukan untuk

memperluas penyampaian kepada pihak ketiga sebagai penyedia barang dan jasa maupun kepada wajib pajak yang memanfaatkan beberapa *fitur on line*.

3. Kebijakan desentralisasi pengadaan peralatan mesin dan pengadaan mebelair diharapkan dapat menjadi salah satu faktor pendorong pemenuhan kebutuhan perangkat daerah dalam rangka memperlancar jalannya pemerintahan. Kebijakan tersebut dimungkinkan akan berdampak pada pencatatan aset masing-masing perangkat daerah apabila pelimpahan pengadaan peralatan mesin dan pengadaan mebelair tidak terwadahi dalam satu kegiatan di setiap perangkat daerah. Perlu upaya meminimalisir permasalahan terkait pengadministrasian barang milik daerah yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi.
4. Beberapa regulasi yang menjadi acuan teknis dan detail pengelolaan keuangan dan aset, yang harus selalu di *up-date* karena perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah dan tuntutan masyarakat, sering memakan waktu yang lama untuk diimplementasikan.
5. Realisasi fisik dan keuangan beberapa kegiatan tidak berjalan sesuai rencana dan terakumulasi di akhir tahun anggaran serta penyerapan anggaran kurang dapat berjalan optimal.
6. Kapasitas dan kapabilitas pegawai dalam mengimplementasikan Standar Akuntansi Pemerintahan yang sepenuhnya berbasis akrual serta dalam hal pengelolaan keuangan dan asset masih perlu ditingkatkan untuk mendapatkan SDM yang sesuai dengan kebutuhan dan dalam rangka meningkatkan tata kelola keuangan dan asset.
7. Pemanfaatan aset daerah yang belum optimal akibat tingginya biaya operasional yang harus dikeluarkan dibanding potensi manfaat yang mestinya bisa diraih.
8. Perencanaan program dan kegiatan belum menggunakan data/informasi yang akurat sebagai dasar penentuan kebutuhan dimasa datang.
9. Program dan kegiatan belum semuanya didukung dengan SOP sehingga berpotensi menimbulkan masalah pengendalian.

Secara umum tantangan yang dihadapi Badan Keuangan dan Aset Daerah berkenaan dengan tugas dan fungsi adalah :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, menyangkut aspek kapabilitas, integritas dan profesionalisme pegawai. Sumber daya manusia yang berkualitas akan

mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang keuangan dan aset yang efektif dan efisien.

2. Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang sesuai dengan kebutuhan baik *software* maupun *hardware* hal ini sejalan dengan perkembangan teknologi.
3. Proses ketatalaksanaan kelembagaan yang harus sesuai dengan regulasi di berbagai tingkatan baik regulasi yang dikeluarkan pemerintah pusat maupun turunannya di daerah. Proses pengelolaan keuangan dan aset yang sesuai dengan regulasi akan menghasilkan produk yang berkualitas dan terhindar dari risiko penyimpangan aspek legal.
4. Tuntutan peningkatan kualitas layanan baik dari masyarakat maupun instansi lain mengharuskan Badan keuangan dan Aset Daerah senantiasa melakukan perbaikan mutu produk layanan terus menerus.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis (Renstra)

Perencanaan Kinerja merupakan serangkaian proses yang menghubungkan antara Rencana Strategis (Renstra) SKPD, Rencana Kerja (Renja) SKPD dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) SKPD. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah paling tidak terdapat tiga tahapan perencanaan yang harus terpenuhi tersebut. Langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah adalah perencanaan strategis agar mampu menjawab tuntutan strategis lokal, nasional maupun global dengan tetap berada pada tatanan sistem perencanaan.

Pada tahap ini dipastikan bahwa Rencana Strategis paling tidak harus memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi. Melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi terutama dalam kurun waktu 2018-2021 Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Sleman berupaya mewujudkan visi dan misi kepala daerah sebagaimana dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman.

1. Visi

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan. Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut ke mana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten, eksis, antisipatif, inovatif dan produktif.

Visi Pemerintah Kabupaten Sleman sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 adalah.

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT SLEMAN YANG LEBIH SEJAHTERA, MANDIRI, BERBUDAYA DAN TERINTEGRASIKANNYA SISTEM E-GOVERNMENT MENUJU SMART REGENCY TAHUN 2021”.

2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi harus jelas dan sesuai tugas pokok dan fungsi karena misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran

yang akan dicapai. Misi juga membawa organisasi kepada suatu fokus, menjelaskan mengapa organisasi ada, apa yang dilakukannya dan bagaimana melakukannya.

Dari 5 (lima) misi yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Sleman yang dapat dilaksanakan Badan Keuangan dan Aset daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah:

Misi 1 :

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kulaitas birokrasi yang responsif dan penerapan e-govt yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.

Misi 3 :

Meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan, aksesibilitas dan kemampuan ekonomi rakyat, serta penanggulangan kemiskinan.

3. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang dan mengarahkan perumusan sasaran serta cara untuk mencapai tujuan untuk jangka waktu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategic. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Sejalan dengan visi dan misi tujuan BKAD Kabupaten Sleman yang telah dirumuskan adalah :

- a) Memperkuat tata kelola pemerintahan daerah
- b) Meningkatkan investasi daerah pada BUMD.

4. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Yang dimaksud indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Adapun sasarannya adalah sebagai berikut :

- a) Meningkatnya akuntabilitas kinerja daerah.
- b) Meningkatnya akuntabilitas keuangan daerah
- c) Meningkatnya kemandirian keuangan daerah.

- d) Meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas SDM dan pelayanan prima bidang keuangan dan aset daerah.
- e) Tercapainya penyertaan modal daerah pada BUMD Penerapan sistem pengendalian intern pemerintah.

5. Strategi

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan kebijakan dan program-program. Adapun strategi-strategi tersebut adalah :

- a) Meningkatkan penyusunan perencanaan, pelaporan kinerja dan penyajian data BKAD
- b) Meningkatkan komitmen penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pengelolaan uang kas daerah (Rekening Kas Pemerintah Daerah)
- c) Meningkatkan tatakelola proses penyusunan APBD
- d) Meningkatkan tatakelola penatausahaan keuangan daerah
- e) Meningkatkan tatakelola penatausahaan aset daerah
- f) Meningkatkan proses dan kualitas penyusunan laporan keuangan daerah
- g) Mengoptimalkan sistem informasi pengelolaan keuangan sehingga dapat memberikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan
- h) Penyusunan dan penyempurnaan regulasi pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- i) Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang dikelola BKAD
- j) Meningkatkan fungsi pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang keuangan dan aset daerah
- k) Meningkatkan pelayanan kesekretariatan
- l) Meningkatkan kualitas SDM dan pelayanan prima di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah
- m) Menyempurnakan prosedur dan standar operasional untuk memberikan kepastian pelayanan dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak
- n) Intensifikasi PAD
- o) Ekstensifikasi Pajak Daerah
- p) Memanfaatkan teknologi informasi secara optimal untuk meningkatkan pelayanan pajak daerah
- q) Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang dikelola BKAD

- r) Pendayagunaan BUMD dalam mendorong meningkatkan perekonomian daerah

Hubungan antara visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi sesungguhnya membentuk pola hubungan dari yang bersifat umum (general) ke khusus (spesifik). Hubungan tersebut akan nampak bila divisualisasikan dalam bentuk tabel sebagaimana terlampir. (*lampiran 1*)

B. Rencana Kerja Tahunan (Renja) SKPD 2018

Renja memiliki fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) kedalam rencana, program dan penganggaran tahunan. Berdasarkan Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses penyusunan Renja SKPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahapan persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja SKPD.

Proses penyusunan Renja SKPD yang dimulai dengan persiapan rancangan Renja SKPD dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi diharapkan dapat menjembatani sinkronisasi dan harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Proses penyusunan Renja didasarkan pada penjabaran aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya.

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Untuk melaksanakan kebijakan yang merupakan perwujudan dan Visi dan Misi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman ditetapkan Program dan Kegiatan Tahun 2018.

Rencana Kerja BKAD 2018 memuat urusan, Program Kegiatan, Indikator kinerja, Target kinerja dan Pagu anggaran yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam tahun anggaran 2018. Renja tersebut dapat dianggap sebagai langkah konkrit dan spesifik dari tujuan dan sasaran yang hendak dicapai sebagaimana tertera dalam Renstra. Tabel Renja BKAD 2018 dapat dilihat dalam lampiran laporan ini. (*lampiran 2*)

C. Penetapan Kinerja (Tapkin) SKPD 2018

Penetapan kinerja (Tapkin BKAD 2018) merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai dan disepakati antara Kepala BKAD (pengguna anggaran entitas pelaporan) dengan Bupati Sleman. Penetapan Kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan BKAD dalam satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Melalui penetapan kinerja ini diharapkan dapat mendorong keberhasilan peningkatan kinerja di lingkungan BKAD. Tapkin BKAD 2018 memuat Sasaran, Indikator kinerja sasaran, Penyusunan penetapan kinerja ini dimulai dengan merumuskan rencana jangka menengah (lima tahunan) yang dilanjutkan dengan menjabarkan rencana lima tahunan tersebut kedalam rencana kinerja tahunan.

Tujuan Umum diterapkannya Penetapan Kinerja adalah pertama, intensifikasi pencegahan korupsi. Kedua peningkatan kualitas pelayanan publik. Ketiga, percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Sedangkan tujuan khususnya adalah pertama, meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Kedua, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Ketiga menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur. Dan keempat sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

Target kinerja sasaran, Program, Kegiatan dan Anggaran. Program, Kegiatan dan Anggaran yang dicantumkan dalam Tapkin mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) BKAD 2018. **(lampiran 3)**

D. Indikator kinerja utama

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai. Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dimana salah satu indikator yang harus dibuat oleh entitas SKPD selaku penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah Indikator Kinerja

Utama. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi. Indikator Kinerja pada tingkat Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (*outcome*) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon I) adalah indikator hasil (*outcome*) dan atau keluaran (*output*) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (*output*) unit kerja dibawahnya. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon II) sekurangkurangnya adalah indikator keluaran (*output*). Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan dan Aset Daerah yaitu:

1. Predikat LAKIP Kabupaten
2. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah
3. Prosentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindak lanjuti
4. Prosentase PAD terhadap Pendapatan Daerah
5. Indeks Kepuasan Masyarakat

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan/hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Berdasar pada pemahaman tersebut diatas, maka semua instansi pemerintah, badan dan lembaga Negara di pusat dan daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing karena akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Penilaian untuk mengetahui tujuan akhir yang ingin dicapai perlu dilakukan oleh organisasi dengan melakukan pengukuran atas kinerjanya. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi BKAD. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi, apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendahnya realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi, apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

Realisasi

Capaian indicator kinerja = $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}}$ x 100 %

Rencana

Kriteria pengukuran kinerja secara umum yang dapat dipergunakan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Kategori Capaian

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1.	Lebih dari 90 %	Sangat Baik
2.	70 % sampai dengan 89,99 %	Baik
3.	55 % sampai dengan 69,99 %	Cukup
4.	Kurang dari 54,99 %	Kurang

Berikut akan disampaikan capaian kinerja BKAD untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis.

Sasaran 1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja daerah

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Sasaran ini dicapai melalui Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan Program Perencanaan Pembangunan Daerah. Yang didukung masing dengan 2 kegiatan dan 1 kegiatan.

Jumlah dana yang dialokasikan untuk Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja pada tahun 2018 sebesar Rp 85.631.000,- realisasi fisik mencapai 100% dengan realisasi keuangan sebesar Rp 76.016.000,- atau 88,776% dengan sisa anggaran Rp 9.615.000,- Sedangkan untuk Program Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH pada tahun 2018 sebesar Rp 106.700.000,- realisasi fisik mencapai 100% dengan realisasi

keuangan sebesar Rp. 61.919.200,- atau 58,03% dengan sisa anggaran Rp 44.780.800,- Indikator sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja daerah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan adalah :

- a. Sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya yang konsisten dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintah.
- b. Komitmen dari pimpinan dan seluruh staf.
- c. Ketersediaan data yang cukup sehingga memperlancar upaya peningkatan perbaikan serta perencanaannya.
- d. Sistem informasi terintegrasi sehingga membantu mengurai permasalahan keterlambatan perencanaan dan pelaporan SKPD.

Tabel 3.2 Indikator Sasaran 1

Indikator	Satuan	Tahun 2017			Tahun 2018		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Predikat Lakip	Nilai	A	B	B	A	BB	BB

Sasaran 2 : Meningkatnya akuntabilitas keuangan daerah

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Sasaran ini dimaksudkan untuk mewujudkan suatu proses pengelolaan keuangan daerah yang melibatkan seluruh stakeholder mulai dari para bendahara SKPD sampai dengan kepala daerah. Dalam proses pengelolaan keuangan daerah diperlukan koordinasi dan peran aktif dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pertanggung jawaban dan pelaporan. Perencanaan khususnya menyangkut angka prediksi ataupun target anggaran yang hendaknya diperhitungkan sematang mungkin. Pelaksanaan menyangkut realisasi anggaran hendaknya dilakukan seefisien dan seefektif mungkin, penggunaan dana agar dipertanggung jawabkan sebaik mungkin serta pelaporan agar dibuat dengan tepat waktu dan akurat.

Sasaran ini dimaksudkan pula untuk menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan barang/aset milik daerah sehingga dalam pelaksanaannya terdapat

kesamaan persepsi dan langkah secara integral dan menyeluruh dari unsur-unsur yang terkait dalam pengelolaan barang/aset daerah. Pengelolaan barang/aset milik daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Sedangkan penatausahaan barang/aset milik daerah meliputi penatausahaan, inventarisasi, dan pelaporan. Barang/aset milik daerah yang berada di bawah penguasaan pengguna barang/kuasa pengguna barang harus dilakukan pencatatan. Proses inventarisasi baik berupa pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah merupakan bagian dari penatausahaan. Hasil dari proses penatausahaan dan inventarisasi diperlukan untuk pelaporan barang milik daerah yang dilakukan oleh kuasa pengguna anggaran, pengguna anggaran, dan pengelola barang.

Sasaran “meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan daerah” ini dicapai melalui Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah yang didukung dengan 46 kegiatan.

Jumlah dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini pada tahun 2018 adalah sebesar Rp67.132.590.988,-. Realisasi fisik mencapai 95,33% dengan realisasi keuangan sebesar Rp50.771.682.445,- atau 75,63% dengan sisa anggaran Rp16.360.908.543,-. Dari hasil kegiatan yang mendukung program tersebut dikategorikan pencapaian sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan “**Sangat Baik**”. Pencapaian opini WTP pada sasaran ini adalah untuk kinerja keuangan tahun 2018.

Tabel 3.3 Indikator Sasaran 2

Indikator	Satuan	Tahun 2017			Tahun 2018		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100%	WTP	WTP	WTP

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan :

- a. Minimnya SDM yang menguasai teknologi informasi sekaligus pengelolaan keuangan, sehingga keberadaan pihak ketiga masih sangat diperlukan.
- b. Belum meratanya tingkat pengetahuan pengelolaan asset.
- c. Terintegrasikannya pengelolaan aset dengan pengelolaan keuangan sehingga membantu proses penyelesaian penyusunan laporan keuangan.

- d. Penggunaan aplikasi sensus barang milik daerah melalui proses scan kode barang dengan teknologi android memudahkan proses pencatatan barang milik daerah sehingga penyusunan laporan barang daerah dapat dilakukan tepat waktu dan penyajian pada laporan keuangan Pemerintah Kabupaten lebih valid.
- e. Dilakukannya rekonsiliasi asset tiap bulan sebagai persyaratan pengajuan ganti uang (GU) mendorong pengadministrasian barang milik daerah lebih tertib dan mengurangi permasalahan yang menumpuk jika hanya dilakukan pada tiap semester.
- f. Tingkat kedisiplinan pengguna barang (SKPD) dalam hal penatausahaan dan pengelolaan asset tetap seperti kesadaran melakukan rekonsiliasi, kesadaran penyerahan asset yang idle dan pemanfaatan aset sesuai ketentuan.

Dari beberapa kegiatan tersebut utamanya adalah untuk mendukung pencapaian indikator dan dalam rangka tertib pengelolaan keuangan dan aset untuk meningkatkan kinerja keuangan. Tingkat keberhasilan pemenuhan sasaran strategis ini mempunyai dampak yang penting (*significant*) bagi proses penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Sleman.

1. Menyediakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Terdiri dari Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) 2018 dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sleman 2019. Penetapan Perda/Perbup PAPBD 2018 berhasil ditetapkan pada tanggal 3 September 2018, target yang semula direncanakan ditetapkan paling lambat tanggal 31 September. Sedangkan Penetapan Perda dan Perbup APBD Kabupaten Sleman 2019 harus melewati serangkaian proses dari Penyusunan RKPD, KUA, RKA, Rancangan Perda APBD hingga penetapan Perda APBD 2019 yang sesuai ketentuan (Permendagri nomor 52 tahun 2015) paling lambat harus sudah ditetapkan tanggal 31 Desember 2018. Perda APBD Kabupaten Sleman 2019 ditetapkan tanggal 6 Desember 2018, lebih awal 5 hari dibanding penetapan APBD tahun sebelumnya. Dengan demikian masih sesuai dengan ketentuan dan bahkan masuk pada kategori penetapan APBD Kabupaten yang lebih awal.

2. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD)

Salah satu tugas utama dari BUD adalah menyediakan dan melakukan pencairan dana atas beban rekening kas daerah sebagaimana diminta oleh Pengguna Anggaran. Penyediaan dana sudah mengacu rencana penyediaan tercantum dalam anggaran kas. Tingkat keberhasilan kinerja diukur berdasar ketersediaan dana sebagaimana diminta oleh pengguna anggaran, untuk keperluan belanja baik langsung maupun tidak langsung sudah sesuai dengan kebutuhan. BUD sudah menjalankan fungsi penyediaan dana sesuai rencana/kebutuhan. Pelaksanaan fungsi ini dapat dilihat dari data penerbitan SP2D tahun 2018 untuk mencukupi kebutuhan belanja APBD 2018 dengan realisasi Rp 2.512.521.836.050,61

3. Melaksanakan Pengelolaan Aset Daerah

Pengelolaan aset daerah berawal kondisi awal Laporan Barang Milik Daerah (BMD) dan berakhir pada Laporan BMD akhir tahun. Dalam perjalanan selama tahun 2018 Laporan BMD awal akan mengalami perubahan karena terdapat perencanaan kebutuhan pengadaan barang dan jasa (RKBU), proses pengadaan, distribusi, penghapusan, inventarisasi (pencatatan dan penilaian) dan kembali ke Pelaporan BMD lagi. Faktor lain yang berpengaruh terhadap Laporan BMD adalah pemeliharaan BMD, TPTGR, penyelesaian status hukum BMD, dan tentu saja efektifitas/efisiensi penyusunan laporan (SIM ASET).

Kesesuaian realisasi pengadaan dengan rencana pengadaan (RKBU) dengan target realisasi 80% dari RKBU 2018 terpenuhi 95% dari target. Sedangkan pengadaan kendaraan dinas, peralatan dan mesin, mebelair dan perlengkapan terrealisasi 95% dari yang ditargetkan. Pengadaan tanah, dari rencana 10 lokasi, yang tidak berhasil diselesaikan adalah pengadaan tanah untuk Pasar Ngijon dan tanah untuk SMP 1 Godean. Tidak terrealisasinya kedua lokasi tanah tersebut karena belum ada kesepakatan harga dengan warga. Pengadaan tanah yang terealisasi adalah tanah perluasan perkantoran Pemerintah Kabupaten Sleman (lokasi Beran, Tridadi, Sleman), tanah untuk akses jembatan Pisangan di dusun Tegal Sumberrejo Tempel, akses jalan untuk pasar klitikan dan ungags di dusun Sucen, Trihanggo Sleman, tanah untuk perluasan pasar Sleman, tanah untuk museum alam Bakalan Cangkringan, tanah untuk jembatan Panggung Cankringan dan tanah untuk Kantor Kecamatan Minggir.

Adapun penyusunan laporan barang daerah sebanyak dua kali dalam satu tahun telah berhasil dilakukan termasuk dilakukannya kegiatan lima tahunan yaitu sensus barang milik daerah. Penyusunan laporan barang milik daerah dan penyusunan laporan sensus barang milik daerah dengan mengandalkan sistem SIMASET, aplikasi persediaan dan aplikasi sensus barang milik daerah dengan proses *scan* kode bar dengan memanfaatkan teknologi *Handphone* android.

4. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD terdiri dari Laporan Keuangan Kabupaten Sleman 2017 dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2017. Penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten Sleman adalah tugas rutin yang harus dilaksanakan setiap tahun. Kegiatan penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten Sleman tahun 2017 adalah menyusun Laporan Keuangan Kabupaten Sleman tahun 2017. Maksimal penyerahan laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban APBD kepada Badan Pemeriksa Keuangan adalah tanggal 31 Maret 2018. Pemerintah Kabupaten Sleman menyerahkan Laporan Keuangan dan Laporan pertanggungjawaban APBD kepada BPK tanggal 29 Maret 2018 sehingga lebih awal dari ketentuan maksimal. Target dari Laporan Keuangan Kabupaten Sleman 2017 adalah Opini WTP dan sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 12B/LHP/XVIII.YOG/05/2018 Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2017 dinyatakan WTP. Sedangkan penyusunan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2017 dan Penetapan Perda/Perbup Pertanggungjawaban APBD 2017 mundur dari target yang direncanakan, dari target semula sebelum 31 Juli 2018 menjadi tanggal 20 Agustus 2018. Hal tersebut tidak mengurangi pencapaian target indikator sasaran strategis (WTP) yang mana juga menjadi indikator utama Pemerintah Kabupaten Sleman.

Dalam hal pengelolaan keuangan, pada tanggal 20 September 2018 Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan memberikan penghargaan atas pencapaian opini WTP Badan Pemeriksa Keuangan 7 (tujuh) kali berturut-turut kepada Pemerintah Kabupaten Sleman. Penghargaan tersebut diterima oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan. Pemerintah Kabupaten Sleman dinilai memenuhi berbagai kriteria utama penerima, diantaranya telah mendapat opini WTP dari Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 7 kali berturut-turut dan dapat menetapkan Perda APBD tepat waktu dan bahkan lebih awal yaitu tanggal 11 Desember 2018 untuk APBD 2019. Hasil dan capaian tersebut menjadi dasar penghitungan Dana Insentif Daerah (DID) tahun 2019 yang didasarkan pada kinerja keuangan daerah, melalui pendekatan yang mengedepankan tiga indikator yaitu kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, layanan dasar publik dan ekonomi serta kesejahteraan. Atas capaian tersebut Pemerintah Kabupaten Sleman mendapatkan alokasi Dana Intensif Daerah (DID) sebesar 71,8 M pada tahun 2019. Sedangkan DID 2017 sebesar 52,5 M dengan demikian meningkat sebesar 19,3 M.



Gambar 3.1 Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan BKAD Sleman Menerima Penghargaan bidang pengelolaan keuangan dari Kementrian Keuangan RI



Gambar 3.2 Bupati Sleman bersama dengan Ketua DPRD Sleman Menerima Laporan Hasil Pemeriksaan dari BPK

Sasaran 3 : Meningkatnya kemandirian keuangan daerah

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah yang diperlukan. Kemandirian keuangan daerah bergantung pada pendapatan daerah, yang merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pajak dan Retribusi merupakan sumber utama dari Pendapatan Asli Daerah yang mendukung kemandirian keuangan daerah.

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggali potensi-potensi PAD yang merupakan sumber penerimaan daerah sendiri agar dapat menanggung sebagian belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan.

Dalam rangka meningkatkan kemandirian keuangan daerah melalui peningkatan capaian pajak dan retribusi sebagai kontribusi dari pencapaian pendapatan daerah keseluruhan, sasaran ini dicapai melalui Program Pengelolaan Pendapatan Daerah yang didukung dengan 17 kegiatan.

Jumlah dana yang dialokasikan untuk mencapai sasaran ini pada tahun 2018 adalah sebesar Rp 19.216.814.698,-. Realisasi fisik mencapai 105,73% dengan realisasi keuangan sebesar Rp19.216.814.698,- atau 95,02% dengan sisa anggaran Rp 1.006.936.802,- Indikator sasaran ini adalah adalah tercapainya target PAD sebesar 32 persen dari pendapatan daerah secara keseluruhan. Pendapatan daerah tahun 2018 terrealisasi sebesar 2.712.752.010.150,21 (*unaudited*), sedangkan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 894.230.891.251,85 (*unaudited*) atau 32,96% dari pendapatan daerah 2.712.752.010.150,21. Capaian yang diperoleh dari sasaran ini sebesar 103% dikategorikan **“Sangat Baik”**.

Pendapatan Asli Daerah bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah. Pajak Daerah yang bersumber dari 10 jenis pajak berhasil merealisasi penerimaannya sebesar Rp 599.282.192.492,83 (*unaudited*). Capaian tersebut melebihi dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp Rp 556.250.000.000,-atau sebesar 107, 74%. Penerimaan dari pajak daerah tersebut jika dibanding tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp 70..828.976.765,65,- atau meningkat sebesar 13 %. Peningkatan disamping karena target yang ditetapkan untuk tahun 2018 naik dibanding target 2017 juga dilakukan berbagai upaya perbaikan dan kemudahan pelayanan dengan mengoptimalkan teknologi berbasis internet.

Retribusi Daerah tahun 2018 terrealisasi sebesar Rp 47.760.996.920,- atau sebesar 111,7% dari target yang ditetapkan yaitu Rp42.758.400.850,-. Dibanding dengan penerimaan Retribusi Daerah tahun 2017 mengalami penurunan sebesar sebesar 1,9% yang diantaranya disebabkan penurunan penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi rekreasi dan olah raga dan retribusi Ijin Mendirikan Bangunan.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan tahun 2018 terrealisasi sebesar Rp 34.654.443.121,29 atau sebesar 100,43% dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp 34.507.634.576,-. Jika dibandingkan dengan penerimaan tahun lalu menurun sebesar 4,5%. Hal ini diantaranya disebabkan karena penurunan pendapatan dari penerimaan bagian laba/deviden Bank BPD. Prosentase kepemilikan saham di Bank BPD DIY menurun karen Propinsi dan Kabupaten/Kota lainnya telah memenuhi kewajiban pemenuhan penyertaan modal di Bank BPD DIY. Hal ini sangat berpengaruh

pada deviden yang diterima Kabupaten Sleman. Pada tahun 2017 dividen yang terima sebesar 26 M dan pada tahun 2018 dividen yang diterima sebesar 23 M.

Sedangkan Lain-lain PAD yang sah tahun 2018 terrealisasi sebesar Rp 212.533.258.717,73 atau sebesar 113,32% dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp 187.55.732.316,65.

Indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan pencapaian sasaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.4 Indikator Sasaran 3

Indikator	Satuan	Tahun 2017			Tahun 2018		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Capaian target PAD	%	31	31,56	101,8%	32	32,96	103%

Pencapaian target PAD dilakukan melalui beberapa kegiatan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan diantaranya adalah :

- a. Kemampuan mengenali potensi dari produk-produk yang menjadi sumber utama Pendapatan Asli Daerah.

Pengenalan potensi utamanya yang bersumber dari potensi pajak dilakukan melalui kegiatan pendataan, pemantauan dan pendaftaran wajib pajak, beberapa wajib pajak baru berhasil dilakukan pendataan untuk selanjutnya didaftar menjadi wajib pajak daerah. Jumlah wajib pajak selain PBB pada tahun 2018 sebanyak 11.527 sedangkan pada tahun 2017 sebanyak 11.301 wajib pajak. Dengan demikian mengalami peningkatan dengan adanya jumlah wajib pajak baru sebanyak 226 WP atau meningka 2%. Disamping itu, upaya menggali dan mengenali potensi dilakukan pula secara mendalam (intensive) terhadap perilaku wajib pajak dengan tujuan mengetahui potensi riil dari wajib pajak. Secara akademis dilakukan kajian potensi pajak untuk mengetahui seberapa besar potensi pajak di Kabupaten Sleman. Hasil kajian tersebut digunakan pula sebagai bahan pembanding realisasi penerimaan pajak secara keseluruhan dan penentuan target pada tahun-tahun berikutnya. Terhadap perilaku wajib pajak sampai dengan saat ini masih harus dilakuan pembinaan baik itu yang sifatnya menyeluruh seperti sosialisasi maupun pembinaan khusus terhadap wajib pajak tertentu dengan cara dilakukan bedah wajib pajak dan atau pemeriksaan wajib pajak. Upaya bedah wajib pajak dan

pemeriksaan pajak dilakukan dalam rangka membina wajib pajak untuk melakukan pengadministrasian terhadap omset wajib pajak dengan benar menurut kaidah akuntansi umumnya.

b. Publikasi melalui media cetak, media elektronik dan tatap muka.

Media cetak dan media elektronik memiliki peranan penting dalam mengenalkan produk-produk kepada masyarakat pengguna jasa dan meningkatkan volume pemakaian sumber pajak dan retribusi. Pemerintah Kabupaten Sleman melalui BKAD khususnya berusaha meningkatkan jumlah wajib pajak aktif sehingga terus berupaya agar para pembayar pajak semakin sadar bahwa peranan membayar pajak sangatlah penting bagi tercapainya pembangunan nasional. Untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak ini BKAD melakukan beberapa kegiatan sosialisasi dengan tujuan memberikan pemahaman bagi masyarakat Sleman.

Selain perlunya meningkatkan kesadaran masyarakat, pemerintah Kabupaten Sleman melalui BKAD juga merasa perlu meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat mengenai sistem dan peraturan perpajakan yang berlaku.

Pada tahun 2018, sosialisasi ditempuh melalui beberapa upaya diantaranya : media elektronik yaitu radio sebanyak 2 (dua) kali, media cetak yaitu koran sebanyak 12 (dua belas) kali, dan beberapa kali tatap muka dengan para wajib pajak. Disamping itu sosialisasi juga dilakukan melalui website yang dikelola Pemerintah Kabupaten Sleman maupun website yang dikelola BKAD.

c. Perbaikan pelayanan kepada wajib pajak.

Dalam upaya perbaikan pelayanan dan peningkatan validitas pengenaan pajak, BKAD memaksimalkan sumber daya diantaranya adalah teknologi. Teknologi memungkinkan pelayanan yang tepat, mudah dan hasil yang lebih valid. Pada saat ini BKAD memiliki memiliki 5 (lima) Sistem Informasi terkait penerimaan pajak yang dikelola BKAD yaitu :

1. Sistem Informasi Pajak Asli Daerah (SIMPAD)

Sistem ini sangat membantu untuk mengadministrasikan penerimaan pajak daerah selain BPHTB dan PBB (karena kedua jenis pajak tersebut berdasarkan karakteristiknya berbeda). Dengan adanya sistem ini permasalahan perhitungan

jumlah pajak dan piutang akan dapat diminimalisir, serta validitas pengakuan jumlah pajak dan piutang akan lebih dapat diyakini kebenarannya.

2. Sistem Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SIM PBB-P2)

Sim PBB P2 ini telah dibangun secara online sehingga wajib pajak PBB P2 dapat melakukan pembayaran pajak PBB P2 di bank-bank yang telah bekerjasama dengan pemerintah kabupaten Sleman.

3. Sistem Bea Perolehan atas Peralihan Tanah dan Bangunan (SIM BPHTB)

Merupakan aplikasi yang berfungsi untuk melakukan manajemen atas pajak Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

4. Sismiop PBB (Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak PBB)

Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak merupakan sistem administrasi yang mengintegrasikan seluruh pelaksanaan kegiatan PBB berbasis komputer, mulai dari pengumpulan data, pemberian identitas, pemrosesan, pemeliharaan, sampai pencetakan hasil keluaran. Sistem ini mengakomodir kebutuhan pekerjaan kantor (administratif) sejak pembentukan / pengumpulan data (dengan pendaftaran, pendataan dan penilaian), pemberian identitas (Nomor Objek Pajak), pemrosesan, pemeliharaan basis data, sampai dengan pencetakan hasil keluaran berupa SPPT, STTS dan DHKP; serta Pelayanan Satu Tempat (PST). Terhitung bulan November 2018 BKAD melakukan peningkatan pelayanan terhadap beberapa aplikasi yang telah dimiliki sebelumnya dengan membuka aplikasi tersebut secara *online*. Beberapa aplikasi *online* tersebut adalah SIM PBB P2 online yang dapat digunakan untuk wajib pajak melakukan pembaharuan data terkait pajak bumi dan bangunan dan SIM BPHTB online.

e. *e-SPTPD* (Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Daerah)

Merupakan sistem aplikasi yang dibangun berbasis web yang dikembangkan sebagai sarana wajib pajak untuk mendaftarkan, membayara dan melaporkan kewajiban pajak daerahnya secara online serta dapat diakses dimana saja. Aplikasi ini terkoneksi secara real time dengan Sistem Informasi Pajak Asli Daerah (SIMPAD) yang sudah berjalan di Badan Keuangan dan Aset Daerah. Dengan adanya *e_SPTPD* on line ini memudahkan wajib pajak melakukan

pengadministrasian dan pembayaran pajak daerah serta mengurangi jumlah antrian wajib pajak yang datang langsung di kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah.



Gambar 3.3 Loker SPTPD Online Kantor BKAD Kabupaten Sleman

d. Kerjasama yang harmonis dengan beberapa pihak.

Selain mengoptimalkan teknologi informasi di internal BKAD, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak PBB P2, BKAD melakukan kerja sama dengan beberapa bank untuk memudahkan wajib pajak melakukan pembayaran. Bank-bank dan lembaga keuangan yang telah bekerjasama dengan BKAD sampai dengan tahun 2018 tersebut adalah : Bank BPD, Bank BRI Syariah, Bank Mandiri, Bank BNI 46 dan seluruh KUD yang tergabung dalam jaringan PUSKUD Metaram. Pada akhir 2018 kerjasama pembayaran Pajak daerah online diperluas lagi yaitu dengan menjalin kerjasama dengan Bank Rakyat Indonesia terhitung untuk pembayaran yang dilakukan mulai tanggal 1 Januari 2019.

Kerjasama juga terjalin dengan instansi vertikal yaitu dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan dengan Kantor Pertanahan. Kerjasama dengan kedua instansi tersebut utamanya adalah kerjasama aliansi dalam rangka perbaikan pelayanan dan memberikan kepastian nilai Dasar Pengenaan Pajak yang sama kepada wajib pajak terkait pembayaran pajak BPHTB dan PPh pasal 4 ayat 2 untuk pajak pusat. Dengan upaya kerjasama aliansi tersebut diharapkan mendorong penerimaan pajak daerah dan pajak pusat sekaligus.

Sedangkan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran, Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah menjalin hubungan baik dengan dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) sebagai lembaga yang menaungi seluruh hotel dan restoran. Hal ini dilakukan untuk menjalin komunikasi antara pemerintah kabupaten Sleman dan pengelola/pemilik Hotel dan Restoran khususnya yang berada diwilayah Sleman. Demikian halnya dengan PPAT/Notaris yang ada di Sleman terkait dengan Pajak BPHTB.

Kerjasama dengan pemerintah desa tetap terus dilakukan terkait dengan upaya pencapaian pajak PBB. Kerjasama dengan desa terkait dengan pencapaian pajak PBB dimulai dengan penyampaian SPPT PBB, pemantauan penyampaian SPPT, pelaksanaan pekan pembayaran PBB, serta penagihan tunggakan-tunggakan dengan cara jemput bola. Kerjasama dengan pemerintah desa dengan melibatkan seluruh kepala dukuh menunjukkan hasil bahwa pada tahun 2018 terhitung sampai dengan 31 Desember 2018 terdapat 22 desa yang lunas. Sedangkan jumlah padukuhan yang lunas per 31 Desember 2018 sebanyak 420 padukuhan. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dibanding tahun 2017 yaitu sebanyak 338 padukuhan yang lunas atau meningkat 24 %. Sedangkan desa yang lunas pada tahun 2017 sebanyak 15 desa.

g. Penegakan peraturan perpajakan

Penegakan aturan ini salah satunya ditempuh berupa pemeriksaan. Pemeriksaan perlu dilakukan untuk menguji kepatuhan serta mendeteksi adanya kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak dan upaya penegakan hukum agar proses dan pelaksanaan sistem sesuai ketentuan yang berlaku. Pada tahun 2018 pemeriksaan dilakukan oleh salah satu KAP pemenang lelang dengan obyek pemeriksaan sebanyak 40 dengan rincian 20 wajib pajak hotel dan 20 wajib pajak restoran. Hal ini untuk menjamin adanya kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak. Dengan adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh KAP sebagai lembaga independen diharapkan mampu menjadi pagar agar wajib pajak tetap berada pada koridor peraturan perpajakan.

Mengingat jumlah wajib pajak daerah yang banyak tidak memungkinkan keseluruhan pemeriksaan dilakukan oleh KAP. Pemeriksaan kepada wajib pajak

juga dilakukan oleh staf BKAD dengan obyek pajak selain yang menjadi obyek pemeriksaan KAP dipilih sampling dengan berdasarkan *track record* wajib pajak.

Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Sasaran ini dicapai melalui program peningkatan kualitas pelayanan publik, program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, program penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip daerah dan program pengembangan komunikasi, informatika dan media massa. Keseluruhan program tersebut didukung 11 kegiatan. Jumlah dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini pada tahun 2018 adalah :

Tabel 3.5 Program yang Mendukung Kualitas Pelayanan Publik

No	Uraian	Anggaran	Realisasi Fisik (%)	Sisa Anggaran
1	Program peningkatan kualitas pelayanan publik	184.357.600	100	14.168.979
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	41.845.950.954	100	543.617.033
3	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1.314.058.000	85	600.762.889
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	267.203.000	100	85.240.500
5	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	206.773.500	100	17.272.500
6	Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa	37.205.000	100	2.295.000
7	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	115.467.000	100	898.500

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan satu indikator kinerja, mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 101,4 % dengan predikat “**Sangat Baik**”.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.6 Indikator Sasaran 4

Indikator	Satuan	Tahun 2017			Tahun 2018		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	78,67	79,16	100,62%	78,80	79,96	101,4%

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman pada tahun 2018 terealisasi 79,96 angka indeks dari target sebesar 78,80 angka indeks, sehingga capaiannya adalah sebesar 101,4%. Realisasi angka Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 79,96 merupakan rata-rata dari angka indeks yang diperoleh dari pelaksanaan survey kepuasan masyarakat dengan responden pengguna jasa/layanan BKAD, UPT Stadion Maguwoharjo, dan UPT Pengelolaan Dana Penguatan Modal. IKM pada pelayanan pengguna jasa/layanan UPTD Stadion Maguwoharjo dan pelayanan pengguna jasa UPTD Pengelolaan Dana Penguatan Modal masing-masing adalah 80,39 dan 81,62. Sedangkan pelayanan pada pengguna jasa di kantor BKAD memperoleh indeks sebesar 77,89. Dengan demikian pelayanan di kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah masih dibawah target. Meskipun tidak mencapai target yang telah ditetapkan, namun nilai yang diraih BKAD telah berada pada kategori sebagaimana nilai indeks yang ditargetkan, yaitu kategori BAIK. Secara rata-rata peroleh IKM termasuk pada kategori SANGAT BAIK. Atas capaian tersebut BKAD tetap perlu memperhatikan unsur-unsur pelayanan yang mengedepankan kepuasan pada pengguna jasa dan meminimalisir kesulitan-kesulitan serta permasalahan yang dikeluhkan oleh pengguna jasa. Sehingga tetap menyusun langkah dan strategi untuk peningkatan pelayanan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan antara lain:

- a. Adanya komitmen jajaran birokrasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagaimana telah menjadi tujuan dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dimana salah satu mekanisme evaluasi yang melibatkan masyarakat adalah melalui Survey Kepuasan Masyarakat. Cakupan sasaran Survey Kepuasan Masyarakat termasuk pula pengguna jasa layanan UPT.
- b. Pengguna jasa yang telah bersedia menjadi objek Survey Kepuasan Masyarakat, sehingga teknis pengambilan data IKM menjadi lebih mudah dan lancar.
- c. Telah ditetapkannya Peraturan Bupati Sleman Nomor 44 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2015-2019.

- d. Telah ditetapkannya Keputusan Bupati Sleman Nomor 70.1/Kep.KDH/ A/2015 tentang Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Sasaran 5 : Tercapainya penyertaan modal daerah pada BUMD

Implementasi otonomi daerah telah membawa iklim baru pada semua Kabupaten dan Kota di Indonesia. Daerah diberi lebih banyak tanggung jawab untuk mengelola semua sumber daya lokal yang ada di daerahnya masing-masing. Secara umum penyertaan modal yaitu suatu usaha untuk memiliki perusahaan yang baru atau yang sudah berjalan, dengan melakukan setoran modal. Setoran modal ini juga yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dalam rangka peningkatan sumber kas daerah.

Dalam melaksanakan penyertaan modal ini, yang terlebih dahulu harus diperhatikan adalah dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat Kabupaten Sleman. Oleh karena itu pengambilan keputusan untuk melakukan penyertaan modal pada 3 BUMD yang ada di Kabupaten Sleman dilakukan melalui pengkajian-pengkajian yang diwadahi dalam suatu program. Sasaran ini dicapai melalui program perencanaan pembangunan ekonomi yang didukung dengan kegiatan perencanaan pengembangan investasi.

Jumlah dana yang dialokasikan untuk mencapai sasaran tersebut melalui satu kegiatan yaitu perencanaan pengembangan investasi. Kegiatan ini pada tahun 2018 adalah sebesar Rp 48.337.000,-. Realisasi keuangan sebesar Rp 46.883.000,- atau 96,99% dengan sisa anggaran Rp 1.454.000,-. Dari hasil kegiatan yang mendukung program tersebut capaian sasaran Tercapainya Penyertaan Modal pada BUMD dikategorikan “Baik”. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “tercapainya penyertaan modal daerah pada BUMD” disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.7 Indikator Sasaran 5

Indikator	Satuan	Tahun 2017			Tahun 2018		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Tercapainya penyertaan modal daerah pada BUMD	%	100	100	100%	100	92,42	92,42%

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan adalah :

- a. Sistem desentralisasi fiskal yang memberikan kebebasan untuk mengatur sistem pembiayaan dan pembangunan daerah sesuai dengan potensi kapasitas daerah.
- b. Adanya BUMD yang memiliki kedudukan yang penting dan strategis dalam menumbuhkan kekuatan perekonomian daerah.
- c. Telah diputuskannya Peraturan Daerah nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sleman.
- d. Telah dipustuskannya Peraturan Daerah Kabupaten Sleman nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman nomor 10 Tahun 2010 tentang Perusahaan Air Minum Daerah Sleman.

Tabel 3.8 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2018 dengan target Tahun 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya akuntabilitas kinerja daerah	Predikat LAKIP	A	BB	BB
Meningkatnya akuntabilitas keuangan daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP		WTP
Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Capaian Target PAD	32%	32,96%	103%
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	78,8	79,97	101,4%
Tercapaiannya penyertaan modal daerah pada BUMD	Realisasi Penyertaan Modal	100%	100%	92,42%

B. Pengukuran Capaian Indikator Kegiatan

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan. Pengukuran kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk prosentasi, rata-rata, angka dan jumlah. Prosentase pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik. Pengukuran capain kinerja indikator kegiatan berusaha untuk menyajikan seberapa besar target input yang meliputi Anggaran, Sumber Daya Manusia, Peralatan, Waktu,

target keluaran dan target hasil tercapai. Dari pelaksanaan kegiatan BKAD tahun 2018 diperoleh hasil rata-rata tingkat capaian indikator masukan dana adalah sebesar 92,31% dan rata-rata tingkat capaian indikator keluaran kegiatan sebesar 100%. **(rincian perhitungan: Lampiran 4).**

a. Beberapa catatan yang berkaitan dengan realisasi indikator kinerja kegiatan antara lain :

1. Kegiatan Penyusunan Laporan Tugas Pembantuan tidak dapat dilaksanakan karena kewenangan penyusunan laporan tugas pembantuan tahun 2018 menjadi kewenangan provinsi sedangkan Pemerintah Kabupaten Sleman menjadi pembantu bendahar. Informasi tentang berpindahnya kewenangan terlambat sehingga kegiatan tidak dapat diusulkan dalam APBD Perubahan.
2. Kegiatan Bimbingan teknis, workshop, seminar dan lokakarya, hal ini disebabkan karena kegiatan ini lebih bersifat antisipatif untuk biaya kontribusi pendaftaran dalam rangka peningkatan kapasitas SDM sesuai dengan kebutuhan dengan melihat pula kredibilitas dari penyelenggara. Kebutuhan pengembangan SDM selama tahun 2018 sebagian telah dipenuhi dari undangan instansi vertikal yang biayanya sebagian ditanggung pihak pengundang.
3. Pengadaan kendaraan, peralatan mesin, mebelair dan perlengkapan tidak dapat realisasi 100% karena kendaraan roda dua yang dianggarkan dengan anggaran perubahan tidak dapat terrealisasi karena waktu penyelesaian pengadaan tidak memungkinkan.
4. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor dan rumah dinas disebabkan karena bersifat antisipatif terhadap kerusakan pada perlengkapan dan peralatan gedung dengan tetap mengupayakan pengeluaran yang dan sesuai kebutuhan serta tingkat kerusakan yang menjadi kewenangan BKAD untuk melakukan pemeliharaan tersebut.
5. Pengadaan tanah, dari rencana 10 lokasi, yang tidak berhasil diselesaikan adalah pengadaan tanah untuk Pasar Ngijon dan tanah untuk SMP 1 Godean. Tidak terrealisasinya kedua lokasi tanah tersebut karena belum ada kesepakatan harga dengan warga. Pengadaan tanah yang terealisasi adalah tanah perluasan perkantoran Pemerintah Kabupaten Sleman (lokasi Beran, Tridadi, Sleman), tanah

untuk akses jembatan Pisangan di dusun Tegal Sumberrejo Tempel, akses jalan untuk pasar klitikan dan ungags di dusun Sucen, Trihanggo Sleman, tanah untuk perluasan pasar Sleman, tanah untuk museum alam Bakalan Cangkringan, tanah untuk jembatan Panggung Cankringan dan tanah untuk Kantor Kecamatan Minggir.

6. Penatausahaan administrasi dana penguatan modal. Pada kegiatan ini direncanakan dilakukan upgrade sistem pengelolaan dana penguatan modal namun tidak dilaksanakan karena pengelolaan keuangan BLUD telah dapat diintegrasikan dengan SIADINDA.

Kegiatan lain dapat dikatakan mampu merealisasikan output 100% dari kebutuhan riil penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang keuangan dan asset meskipun masih menyisakan anggaran namun hal ini lebih disebabkan karena dinamika di lapangan dan tidak mengurangi sebagaimana direncanakan pada awal tahun atau saat perubahan APBD 2018.

C. Realisasi Anggaran

Badan Keuangan dan Aset Daerah memiliki fungsi sebagai perangkat daerah dan sebagai bendahara umum daerah (BUD/PPKD).

C.1. Realisasi Anggaran Belanja dan Pendapatan BKAD

Realisasi Anggaran Belanja BKAD

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 dan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018, pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah didukung anggaran yang meliputi:

Belanja Tidak Langsung :

- a. Sebelum Perubahan : Rp 32.074.313.600,00
- b. Setelah Perubahan : Rp 35.578.989.397,00

Belanja Langsung :

- c. Sebelum Perubahan : Rp 98.719.904.442,00
- d. Setelah Perubahan : Rp 130.374.027542,00

Tabel 3.9 Realisasi Anggaran BKAD 2018

No	Belanja	Anggaran	Realisasi	%
A	Belanja Tidak Langsung	Rp 35.578.989.397	Rp 26.150.708.195	73,5
B	Belanja Langsung	Rp 130.374.027.542	Rp 111.812.065.240	85,76
	a. Belanja Pegawai	Rp 16.652.622.950	Rp 15.734.285.350	94,48
	b. Belanja Barang dan Jasa	Rp 51.687.378.504	Rp 48.978.139.045	94,75
	c. Belanja Modal	Rp 62.034.026.088	Rp 47.099.640.844	75,92
	Jumlah	Rp 165.945.016.939	Rp 137.962.773.435	83,13

Data per tanggal 15 Februari 2018 *unaudited*

Belanja langsung sebagaimana tersebut diatas dialokasikan untuk melaksanakan 6 urusan yaitu urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informasi, urusan pemerintahan bidang kearsipan, urusan sekretariat daerah, urusan inspektorat, urusan perencanaan dan urusan keuangan, dijabarkan dalam 12 program yang meliputi 78 kegiatan. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2018, tidak terdapat perubahan kegiatan. Adapun rincian belanja langsung dapat dilihat pada tabel 3.13.

Pada Tahun 2018 Badan Pengelola Keuangan Aset dan Daerah menargetkan pendapatan yang terdiri dari pajak dan retribusi sebagai berikut :

Pendapatan BKAD

Tabel 3.10 Pendapatan BKAD

No	Jenis Penerimaan	Target	Realisasi	Prosentase %
1	Pajak Daerah	Rp 556.250.000.000,00	Rp 599.355.446.892,83	107,75
	Pajak Hotel	Rp 88.000.000.000,00	Rp 99.224.609.183,00	112,76
	Pajak Restoran	Rp 86.000.000.000,00	Rp 92.288.996.520	107,31
	Pajak Hiburan	Rp 20.000.000.000,00	Rp 20.352.324.165	101,76
	Pajak Reklame	Rp 9.000.000.000,00	Rp 9.804.866.879	108,94
	Pajak Penerangan Jalan	Rp 95.000.000.000,00	Rp 97.560.038.986	102,69
	Pajak Parkir	Rp 5.500.000.000,00	Rp 5.793.660.166	105,34
	Pajak Air Bawah Tanah	Rp 2.750.000.000,00	Rp 3.074.071.212	111,78

Data per tanggal 15 Februari 2018 *unaudited*

Lanjutan Tabel 3.10 Pendapatan BKAD

No	Jenis Penerimaan	Target	Realisasi	Prosentase %
	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Rp 8.000.000.000,00	Rp 8.855.754.925	110,7
	Pajak Bumi dan Bangunan	Rp 72.000.000.000,00	Rp 73.611.073.942	102,24
	Pajak BPHTB	Rp 170.000.000.000,00	Rp 188.790.050.914,83	111,05
2	Retribusi Daerah	Rp 1.733.220.000,00	Rp 1.990.020.970,00	114,82
	Retribusi Jasa Usaha	Rp 1.733.220.000,00	Rp 1.990.020.970,00	114,82
3	lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	Rp 2.984.995.000,00	Rp 4.943.673.948,00	165,62
	Kontribusi penguatan modal	Rp 2.984.995.000,00	Rp 3.979.924.936,00	133,33
	Lain-lain PAD yang sah	Rp 0	Rp 963.749.012,00	100
	Jumlah	Rp 560.968.215.000,00	Rp 606.289.141.810,83	108,08

Data per tanggal 15 Februari 2018 *unaudited*

C.2. Realisasi Anggaran Belanja dan Pendapatan PPKD

Realisasi Anggaran Belanja PPKD

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 dan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018, pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku bendahara umum daerah (BUD/PPKD) didukung anggaran sebagai berikut :

Belanja Tidak Langsung :

- a. Sebelum Perubahan : Rp 381.300.789.929,24
- b. Setelah Perubahan : Rp 406.706.624.115,96

Tabel 3.11 Realisasi Anggaran PPKD 2018

No	Belanja	Anggaran	Realisasi	%
A	Belanja Tidak Langsung	Rp 406.706.624.115,96	Rp 381.492.332.244,00	93,80
	Jumlah	Rp 406.706.624.115,96	Rp 381.492.332.244,00	93,80

Data per tanggal 15 Februari 2018 *unaudited*

Realisasi Pendapatan PPKD

Badan Keuangan dan Aset Daerah berfungsi sebagai BUD/PPKD melaksanakan fungsinya mengelola pendapatan, belanja dan pembiayaan. Berikut Anggaran Pendapatan dan Belanja BUD/PPKD :

Tabel 3.12 Realisasi Pendapatan PPKD 2018

No	Jenis Penerimaan	Setelah Perubahan	Realisasi	%
1	Hasil Pengelolaan Aset Daerah yang Dipisahkan	Rp 34.507.634.576	Rp 36.292.748.408	100
	- Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	Rp 34.507.634.576	Rp	100
2	Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	Rp 43.534.540.589	Rp 37.174.481.514	83,14
	- Penerimaan Jasa Giro	Rp 2.534.540.589	Rp 2.447.362.436	95,97
	- Pendapatan Bunga Deposito	Rp 41.000.000.000	Rp 30.363.786.732	72,02
3	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	Rp 76.118.390.000	Rp 60.499.721.072	86,47
	- Bagi Hasil Pajak	Rp 71.085.123.000	Rp 55.844.322.068	86,74
	- Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	Rp 945.911.000	Rp 535.253.390	35,79
	- Dana Bagi Hasil Cukai	Rp 4.087.356.000	Rp 4.120.145.614	100,8
4	Dana Alokasi Umum	Rp 996.492.454.000	Rp 996.492.454.000	100
5	Dana Alokasi Khusus	Rp 323.558.121.963	Rp 278.580.346.224	86,64
6	Dana Alokasi khusus fisik reguler	Rp 68.028.146.000	Rp 80.855.810.000	100
7	Dana Alokasi Khusus fisik penugasan	Rp 21.001.574.000	Rp 8.712.131.733	116,16
8	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	Rp 6.654.102.299	Rp 214.366.369.383,86	106,42
9.	Pendapatan Hibah Dana Bos	Rp 73.6239.200.000	Rp 214.366.369.383,86	
10.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi	Rp 210.279.939.264	Rp 52.588.927.000	100
11.	Dana Penyesuaian	Rp 132.687.698.000		
10	Bantuan Keuangan dari Provinsi	Rp 906.347.000	Rp 17.655.805.907	100
	Jumlah	Rp 1.898.368.427.692	Rp 2.207.105.802.147	101,15

Data per tanggal 15 Februari 2018 *unaudited*

Tabel 3.13 Rincian Belanja Langsung BKAD Kab Sleman Tahun 2018

Kode Urusan/ Program/Kegiatan	Uraian	Koordinator Kegiatan	Anggaran	Realisasi					Sisa Anggaran
				Bulan Ini	Bulan Lalu	s.d Bulan Ini	%	Fisik (%)	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
3.00.05.01	Badan Keuangan dan Aset Daerah		131.568.025.542	27.149.855.088	85.730.219.908	112.880.074.996	85,80	98,17	18.687.950.546
1.02.10.3.00.05.01	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika		152.672.000	19.135.000	130.343.500	149.478.500	97,91	100,00	3.193.500
15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa		37.205.000	13.890.000	21.020.000	34.910.000	93,83	100,00	2.295.000
1.02.10.3.00.05.01.15.009	Pengelolaan Website	Tin Ibriz Fana, SE, M.Ec.Dev	37.205.000	13.890.000	21.020.000	34.910.000	93,83	100,00	2.295.000
19	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi		115.467.000	5.245.000	109.323.500	114.568.500	99,22	100,00	898.500
1.02.10.3.00.05.01.19.003	Pengelolaan Sistem Informasi Penggajian	Raminta, SE, M.Si	115.467.000	5.245.000	109.323.500	114.568.500	99,22	100,00	898.500
1.02.18.3.00.05.01	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan		206.773.500	17.784.000	171.717.000	189.501.000	91,65	100,00	17.272.500
16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah		206.773.500	17.784.000	171.717.000	189.501.000	91,65	100,00	17.272.500
1.02.18.3.00.05.01.16.006	Pengelolaan Dokumen SKPD	Rr. Yun Wahyuni, SE, MM	148.822.500	15.736.000	124.175.000	139.911.000	94,01	100,00	8.911.500
1.02.18.3.00.05.01.16.008	Penyelenggaraan penyusutan arsip	Rr. Yun Wahyuni, SE, MM	57.951.000	2.048.000	47.542.000	49.590.000	85,57	100,00	8.361.000
3.00.01.3.00.05.01	Urusan Sekretariat Daerah		184.357.600	2.460.000	167.728.621	170.188.621	92,31	100,00	14.168.979

20	Program peningkatan kualitas pelayanan publik		184.357.600	2.460.000	167.728.621	170.188.621	92,31	100,00	14.168.979
3.00.01.3.00.05.01.20.079	Pembinaan kinerja kelembagaan PPK-BLUD	Wijayasari, SE, MM	101.185.000	2.460.000	95.179.273	97.639.273	96,50	100,00	3.545.727
3.00.01.3.00.05.01.20.085	Pelayanan pemanfaatan aset daerah	Dewi Pratika Damayanti, SE	83.172.600	0	72.549.348	72.549.348	87,23	100,00	10.623.252
3.00.03.3.00.05.01	Urusan Inspektorat		106.700.000	49.528.900	12.390.300	61.919.200	58,03	90,00	44.780.800
15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH		106.700.000	49.528.900	12.390.300	61.919.200	58,03	90,00	44.780.800
3.00.03.3.00.05.01.15.018	Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi	Tin Ibriz Fana, SE, M.Ec.Dev	106.700.000	49.528.900	12.390.300	61.919.200	58,03	90,00	44.780.800
3.00.04.3.00.05.01	Urusan Perencanaan		48.337.000	0	46.883.000	46.883.000	96,99	100,00	1.454.000
19	Program perencanaan pembangunan ekonomi		48.337.000	0	46.883.000	46.883.000	96,99	100,00	1.454.000
3.00.04.3.00.05.01.19.025	Perencanaan Pengembangan Investasi	Siti Nurjannah Kusumaningsih, ST, MA, M.Ec.Dev	48.337.000	0	46.883.000	46.883.000	96,99	100,00	1.454.000
3.00.05.3.00.05.01	Urusan Keuangan		130.869.185.442	27.060.947.188	85.201.157.487	112.262.104.675	85,78	98,10	18.607.080.767
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		41.845.950.954	3.743.782.021	37.558.551.900	41.302.333.921	98,70	100,00	543.617.033
3.00.05.3.00.05.01.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Misri Rusmiyati, SE, M.M	172.320.000	26.460.000	137.530.000	163.990.000	95,17	100,00	8.330.000
3.00.05.3.00.05.01.01.024	Penyediaan jasa keamanan dan Kebersihan	Rr. Yun Wahyuni, SE, MM	411.603.000	59.287.140	343.242.104	402.529.244	97,80	100,00	9.073.756
3.00.05.3.00.05.01.01.025	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran	Rr. Yun Wahyuni, SE, MM	41.262.027.954	3.658.034.881	37.077.779.796	40.735.814.677	98,72	100,00	526.213.277

2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		1.314.058.000	349.023.290	364.271.821	713.295.111	54,28	85,00	600.762.889
3.00.05.3.00.05.01.02.033	Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair	Rr. Yun Wahyuni, SE, MM	1.314.058.000	349.023.290	364.271.821	713.295.111	54,28	85,00	600.762.889
5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		267.203.000	75.840.000	106.122.500	181.962.500	68,10	100,00	85.240.500
3.00.05.3.00.05.01.05.009	Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai	Rr. Yun Wahyuni, SE, MM	267.203.000	75.840.000	106.122.500	181.962.500	68,10	100,00	85.240.500
6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		85.631.000	31.477.350	44.538.650	76.016.000	88,77	100,00	9.615.000
3.00.05.3.00.05.01.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tin Ibriz Fana, SE, M.Ec.Dev	51.192.000	18.589.950	25.612.050	44.202.000	86,35	100,00	6.990.000
3.00.05.3.00.05.01.06.005	Penyusunan perencanaan kerja SKPD	Tin Ibriz Fana, SE, M.Ec.Dev	34.439.000	12.887.400	18.926.600	31.814.000	92,38	100,00	2.625.000
15	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah		67.132.590.988	20.555.257.809	30.216.424.636	50.771.682.445	75,63	95,33	16.360.908.543
3.00.05.3.00.05.01.15.001	Penyusunan analisa standar belanja	Irawati Palupi Dewi, SE, M.Sc, MT	70.460.000	41.112.500	23.085.000	64.197.500	91,11	100,00	6.262.500
3.00.05.3.00.05.01.15.002	Penyusunan standar barang dan jasa	Irawati Palupi Dewi, SE, M.Sc, MT	235.104.250	70.595.000	156.573.000	227.168.000	96,62	100,00	7.936.250
3.00.05.3.00.05.01.15.006	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Drs. Ibnu Pujarta, M.Si	628.920.000	53.380.500	372.541.250	425.921.750	67,72	100,00	202.998.250

3.00.05.3.00.05.01.15.008	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	Drs. Ibnu Pujarta, M.Si	527.577.500	45.954.114	350.450.600	396.404.714	75,14	100,00	131.172.786
3.00.05.3.00.05.01.15.012	Penyusunan Sistem informasi keuangan daerah	Sri Suryanti, SE	394.000.000	78.055.000	291.886.500	369.941.500	93,89	100,00	24.058.500
3.00.05.3.00.05.01.15.014	Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Danang Mintoko, SE	243.233.500	25.250.000	100.345.999	125.595.999	51,64	80,00	117.637.501
3.00.05.3.00.05.01.15.016	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	Dewi Pratika Damayanti, SE	30.647.000	0	25.740.000	25.740.000	83,99	100,00	4.907.000
3.00.05.3.00.05.01.15.017	Peningkatan manajemen investasi daerah	Siti Nurjannah Kusumaningsih, ST, MA, M.Ec.Dev	78.569.900	3.242.500	57.844.100	61.086.600	77,75	100,00	17.483.300
3.00.05.3.00.05.01.15.026	Penyusunan Laporan Tugas Pembantuan	Sri Suryanti, SE	39.335.000	0	703.500	703.500	1,79	10,00	38.631.500
3.00.05.3.00.05.01.15.028	Penyusunan petunjuk pelaksanaan APBD	Irawati Palupi Dewi, SE, M.Sc, MT	39.914.500	5.250.000	31.327.500	36.577.500	91,64	100,00	3.337.000
3.00.05.3.00.05.01.15.033	Pengelolaan SPT Masa dan Tahunan (PPH 21)	Raminta, SE, M.Si	112.750.000	1.284.000	108.491.500	109.775.500	97,36	100,00	2.974.500
3.00.05.3.00.05.01.15.035	Pengelolaan Pos Bantuan Keuangan	Misri Rusmiyati, SE, M.M	52.220.000	15.252.500	32.156.500	47.409.000	90,79	100,00	4.811.000
3.00.05.3.00.05.01.15.036	Pengadaan Tanah	Dwi Nugroho, SE, M.Ec.Dev	36.652.116.088	11.356.712.241	12.260.985.680	23.617.697.921	64,44	95,00	13.034.418.167
3.00.05.3.00.05.01.15.037	Pengadaan Kendaraan Dinas, peralatan, mesin, mebelair, dan perlengkapan	Dwi Nugroho, SE, M.Ec.Dev	21.005.445.800	7.583.328.191	11.673.311.032	19.256.639.223	91,67	100,00	1.748.806.577
3.00.05.3.00.05.01.15.040	Pengamanan dan Pemeliharaan barang daerah	Dewi Pratika Damayanti, SE	719.000.000	117.200.958	538.011.715	655.212.673	91,13	100,00	63.787.327
3.00.05.3.00.05.01.15.041	Penyusunan RKBMD	Dwi Nugroho, SE, M.Ec.Dev	45.000.000	0	38.150.000	38.150.000	84,78	100,00	6.850.000
3.00.05.3.00.05.01.15.042	Penghapusan aktiva tetap	Dewi Pratika Damayanti, SE	150.089.500	48.718.000	64.753.000	113.471.000	75,60	100,00	36.618.500

3.00.05.3.00.05.01.15.045	Penyusunan dan Pengesahan DPA, DPPA dan DPAL	Drs. Ibnu Pujarta, M.Si	392.382.500	165.787.000	131.200.000	296.987.000	75,69	100,00	95.395.500
3.00.05.3.00.05.01.15.046	Penyusunan Anggaran Kas	Drs. Ibnu Pujarta, M.Si	12.241.000	0	10.070.000	10.070.000	82,26	100,00	2.171.000
3.00.05.3.00.05.01.15.051	Penyelesaian Status Hukum Kepemilikan Aset Daerah	Dwi Nugroho, SE, M.Ec.Dev	251.000.000	12.655.544	158.177.138	170.832.682	68,06	100,00	80.167.318
3.00.05.3.00.05.01.15.052	Pengelolaan SIM Aset	Herni Margiyanti, S.Sos, M.Si	172.000.000	91.572.500	72.662.200	164.234.700	95,49	100,00	7.765.300
3.00.05.3.00.05.01.15.056	Analisis data dan penerbitan SP2D	Nisa Fidyati, SE., M.Si	165.368.000	4.755.000	110.346.500	115.101.500	69,60	100,00	50.266.500
3.00.05.3.00.05.01.15.057	Analisis Data dan penerbitan SKPP	Raminta, SE, M.Si	33.240.000	4.950.000	28.288.500	33.238.500	#####	100,00	1.500
3.00.05.3.00.05.01.15.059	Pengelolaan dan Pengendalian Dana Transfer dan Bagi Hasil Propinsi	Nisa Fidyati, SE., M.Si	62.000.000	2.700.000	54.178.500	56.878.500	91,74	100,00	5.121.500
3.00.05.3.00.05.01.15.062	Validasi SPJ	Wijayasari, SE, MM	54.593.000	4.568.000	48.685.000	53.253.000	97,55	100,00	1.340.000
3.00.05.3.00.05.01.15.063	Pengelolaan DBH Cukai dan Pajak Rokok	Irawati Palupi Dewi, SE, M.Sc, MT	23.597.000	0	23.443.000	23.443.000	99,35	100,00	154.000
3.00.05.3.00.05.01.15.068	Pelaporan administrasi gaji dan pembinaan pengelola gaji	Raminta, SE, M.Si	94.575.000	9.326.000	85.062.000	94.388.000	99,80	100,00	187.000
3.00.05.3.00.05.01.15.071	Penyusunan laporan dan penyelesaian permasalahan barang daerah	Herni Margiyanti, S.Sos, M.Si	194.025.000	45.910.000	108.097.000	154.007.000	79,37	100,00	40.018.000
3.00.05.3.00.05.01.15.072	Pendampingan penyusunan laporan keuangan SKPD	Wijayasari, SE, MM	299.900.000	43.255.800	164.524.740	207.780.540	69,28	100,00	92.119.460
3.00.05.3.00.05.01.15.073	Rekonsiliasi data keuangan daerah	Wijayasari, SE, MM	33.737.200	3.550.500	28.757.000	32.307.500	95,76	100,00	1.429.700
3.00.05.3.00.05.01.15.075	Pendampingan program hibah	Siti Nurjannah Kusumaningsih, ST, MA, M.Ec.Dev	125.000.000	17.304.155	96.300.163	113.604.318	90,88	100,00	11.395.682

3.00.05.3.00.05.01.15.076	Penyusunan laporan realisasi APBD	Sri Suryanti, SE	265.000.000	4.939.000	188.287.000	193.226.000	72,92	100,00	71.774.000
3.00.05.3.00.05.01.15.080	Penyelesaian Permasalahan Penatausahaan Keuangan	Wijayasari, SE, MM	21.408.000	75.000	20.668.212	20.743.212	96,89	100,00	664.788
3.00.05.3.00.05.01.15.082	Pengelolaan administrasi, penyimpanan, dan distribusi barang milik daerah	Dwi Nugroho, SE, M.Ec.Dev	38.997.000	1.350.000	34.147.600	35.497.600	91,03	100,00	3.499.400
3.00.05.3.00.05.01.15.083	Sensus barang milik daerah	Herni Margiyanti, S.Sos, M.Si	1.557.184.000	39.129.750	1.347.385.860	1.386.515.610	89,04	100,00	170.668.390
3.00.05.3.00.05.01.15.092	Verifikasi dana penguatan modal	Rumiyati, SE	1.193.998.000	528.623.706	539.386.047	1.068.009.753	89,45	100,00	125.988.247
3.00.05.3.00.05.01.15.093	Penyusunan laporan realisasi penerimaan dan belanja daerah	Wijayasari, SE, MM	48.500.000	3.160.000	42.495.500	45.655.500	94,14	100,00	2.844.500
3.00.05.3.00.05.01.15.100	Penyusunan Regulasi Keuangan Daerah	Tin Ibriz Fana, SE, M.Ec.Dev	116.585.000	31.880.000	61.441.000	93.321.000	80,05	100,00	23.264.000
3.00.05.3.00.05.01.15.106	Penyusunan Laporan Keuangan Daerah	Sri Suryanti, SE	487.858.500	2.712.800	391.635.700	394.348.500	80,83	100,00	93.510.000
3.00.05.3.00.05.01.15.108	Pengendalian KASda	Nisa Fidyati, SE., M.Si	67.952.500	6.530.000	60.839.500	67.369.500	99,14	100,00	583.000
3.00.05.3.00.05.01.15.111	Penatausahaan keuangan dan aset SKPD	Misri Rusmiyati, SE, M.M	77.057.500	20.682.300	52.269.600	72.951.900	94,67	100,00	4.105.600
3.00.05.3.00.05.01.15.116	Evaluasi Kebijakan Anggaran dan Penyusunan Instruksi Anggaran	Irawati Palupi Dewi, SE, M.Sc, MT	59.968.750	1.275.750	55.378.000	56.653.750	94,47	100,00	3.315.000
3.00.05.3.00.05.01.15.117	Penyusunan Regulasi Keuangan Daerah	Tin Ibriz Fana, SE, M.Ec.Dev	0	0	-1.055.000	-1.055.000	0,00	0,00	1.055.000
3.00.05.3.00.05.01.15.119	Verifikasi dan klarifikasi penerangan jalan umum (PJU)	Misri Rusmiyati, SE, M.M	90.000.000	23.647.500	51.492.500	75.140.000	83,49	100,00	14.860.000
3.00.05.3.00.05.01.15.121	Pelaporan Informasi Keuangan Daerah	Irawati Palupi Dewi, SE, M.Sc, MT	34.000.000	0	31.200.000	31.200.000	91,76	100,00	2.800.000

3.00.05.3.00.05.01.15.122	Analisis Validitas Data pembayaran LS kepada pihak ketiga	Nisa Fidyati, SE., M.Si	136.040.000	39.582.000	94.704.500	134.286.500	98,71	100,00	1.753.500
18	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		20.223.751.500	2.305.566.718	16.911.247.980	19.216.814.698	95,02	105,73	1.006.936.802
3.00.05.3.00.05.01.18.001	Pendaftaran wajib pajak daerah	Rodentus Condrosulistyo, SE, MM	222.190.000	32.410.000	186.237.000	218.647.000	98,41	125,82	3.543.000
3.00.05.3.00.05.01.18.007	Penetapan pajak	Tintin Fathonah, S.Sos, M.Si	152.985.600	10.927.500	142.008.500	152.936.000	99,97	114,57	49.600
3.00.05.3.00.05.01.18.010	Penagihan Pajak daerah	Safirta Harya Rekyani, SE, M.Acc	718.560.000	32.050.000	639.393.000	671.443.000	93,44	100,00	47.117.000
3.00.05.3.00.05.01.18.015	Evaluasi PAD	Danang Mintoko, SE	247.683.000	116.006.500	44.334.000	160.340.500	64,74	100,00	87.342.500
3.00.05.3.00.05.01.18.035	Pengelolaan sistem informasi pajak Sleman (SIMPAMAN)	Rr. Yun Wahyuni, SE, MM	187.846.000	20.040.000	99.225.000	119.265.000	63,49	95,00	68.581.000
3.00.05.3.00.05.01.18.036	Penyampaian SPPT PBB	Tintin Fathonah, S.Sos, M.Si	1.506.078.000	145.300.000	1.305.776.650	1.451.076.650	96,35	100,00	55.001.350
3.00.05.3.00.05.01.18.044	Pelayanan permohonan keringanan pajak daerah	Muh. Yunan Nurtrianto, S.STP, M.Sc	133.964.400	1.635.000	125.942.500	127.577.500	95,23	97,00	6.386.900
3.00.05.3.00.05.01.18.045	Penagihan PBB	Safirta Harya Rekyani, SE, M.Acc	7.066.332.500	655.650.000	6.276.045.250	6.931.695.250	98,09	100,00	134.637.250
3.00.05.3.00.05.01.18.047	Penelitian SSPD dan BPHTB	Tintin Fathonah, S.Sos, M.Si	451.734.000	26.207.000	413.495.501	439.702.501	97,34	122,16	12.031.499
3.00.05.3.00.05.01.18.049	Pendampingan intensifikasi PPh OPDN	Danang Mintoko, SE	170.521.500	36.835.000	90.065.000	126.900.000	74,42	100,00	43.621.500
3.00.05.3.00.05.01.18.052	Penyekenggaraan Administrasi PBB	Deni Ria Setiawati, SE, MM	1.204.860.000	11.393.500	1.188.990.000	1.200.383.500	99,63	100,00	4.476.500

3.00.05.3.00.05.01.18.057	Pemutakhiran data subyek pajak dan obyek pajak	Rodentus Condrosulistyo, SE, MM	3.594.895.000	234.714.500	3.292.668.000	3.527.382.500	98,12	147,78	67.512.500
3.00.05.3.00.05.01.18.059	Pemanfaatan dan publikasi sarana dan prasarana olahraga	Suroto, S.Sos	181.012.000	32.347.500	91.074.000	123.421.500	68,18	90,00	57.590.500
3.00.05.3.00.05.01.18.060	Pemeriksaan Wajib Pajak Daerah	Deni Ria Setiawati, SE, MM	257.954.000	45.348.500	205.587.000	250.935.500	97,28	110,00	7.018.500
3.00.05.3.00.05.01.18.061	Pendataan, pemantauan dan pembinaan Wajib Pajak Daerah	Deni Ria Setiawati, SE, MM	351.982.500	50.745.000	297.861.000	348.606.000	99,04	100,00	3.376.500
3.00.05.3.00.05.01.18.063	Kajian potensi pendapatan daerah	Danang Mintoko, SE	98.273.000	0	53.252.500	53.252.500	54,19	100,00	45.020.500
3.00.05.3.00.05.01.18.064	Pengelolaan Sarana Prasarana Olahraga	Suroto, S.Sos	3.676.880.000	853.956.718	2.459.293.079	3.313.249.797	90,11	95,00	363.630.203

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sleman tahun 2018 merepresentasikan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan di bidang keuangan dan aset daerah Kabupaten Sleman.

Upaya untuk menuju pengelolaan keuangan daerah yang lebih tertib terus dilakukan untuk dapat mengikuti dinamika peraturan dan ketentuan dibidang pengelolaan keuangan yang terus berubah dari tahun ke tahun. Laporan ini memuat capaian kinerja sasaran strategis dan capaian kinerja indikator kegiatan penunjang sasaran strategis beserta analisis yang diperlukan. Data pencapaian kinerja sasaran dan kegiatan digunakan sebagai bahan evaluasi dan sebagai salah satu acuan dalam rangka perbaikan perencanaan maupun pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berikutnya, khususnya guna perbaikan kinerja BKAD di masa datang.

Perlu disadari bahwa setiap perubahan yang terjadi adalah karena adanya keinginan dan dorongan untuk lebih baik dari sebelumnya. Diperlukan komitmen dari semua pihak untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Selain itu juga diperlukan kemampuan aparat pengelola keuangan dan pemahaman serta tekad yang kuat melakukan perubahan untuk mempertahankan opini “Wajar Tanpa Pengecualian”.

Demikian penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2018 (LKjIP) Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sleman. Tentu dalam laporan ini masih banyak kekurangan baik dalam hal format/kaidah pelaporan yang baik maupun dalam hal redaksional.

Lampiran:

- 1. Hubungan antara visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi**
- 2. Tabel Renja BKAD 2018**
- 3. Penetapan Kinerja (Tapkin) SKPD 2018**
- 4. Pengukuran Capaian Indikator Kegiatan 2015**
- 5. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 (Eselon II)**

Lampiran 1 : Hubungan Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator, Target, Strategi dan Kebijakan

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Strategi	Kebijakan
	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kulaitas birokrasi yang responsif dan penerapan e-govt yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat	Menguatkan tata kelola pemerintahan daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja daerah	Predikat LAKIP	A	Meningkatkan penyusunan perencanaan, pelaporan kinerja dan penyajian data BKAD	Penyusunan dokumen perencanaan SKPD tepat waktu
							Penyusunan laporan pencapaian realisasi fisik dan keuangan BKAD tepat waktu
							Melaksanakan pengendalian dan evaluasi kegiatan dan program BKAD
						Meningkatkan komitmen penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Penyusunan SOP pengelolaan keuangan dan aset daerah
			Meningkatnya akuntabilitas keuangan daerah	Opini BPK terhadap LKD	WTP	Meningkatkan tatakelola proses penyusunan APBD	Menyusun dokumen APBD tepat waktu yang didukung dengan petunjuk pelaksanaan dan standar penyusunan
							Mengeluarkan instruksi anggaran dan menyusun jadwal pencermatan
							Meningkatkan koordinasi antara pokja dengan DPRD, Pemprov dan Pemerintah Pusat

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Strategi	Kebijakan
						Meningkatkan tatakelola penatausahaan keuangan daerah	Menganalisis kelengkapan dan kebenaran dokumen-dokumen perbendaharaan daerah yang terdiri dari analisis dokumen permohonan dana dari SKPD (SPM/SPP)
							Penerbitan SPD dan SP2D
							Konfirmasi dan sinkronisasi pencairan dana (SP2D) dengan Bank BPD setiap saat
							Rekapitulasi pajak penghasilan setiap bulan (SPT Masa) dan tahunan (SPT tahunan)
							Pelaporan penyerapan dana transfer
							Verifikasi dokumen kontrak
							Meningkatkan pengelolaan uang kas
							Meningkatkan pengelolaan dana hibah dan bansos meliputi penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan monitoring dan evaluasi
							Peningkatan pengelolaan dana penguatan modal

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Strategi	Kebijakan
							Penerapan prosedur akuntansi dan pelaporan BKAD
							Penatausahaan dokumen pengeluaran dan penerimaan pelaksanaan APBD BKAD
						Meningkatkan tatakelola penatausahaan aset daerah	Penyusunan dokumen rencana pengadaan
							Melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa usulan SKPD sesuai peraturan yang berlaku
							Pendistribusian barang hasil pengadaan sesuai SKPD yang mengusulkan
							Inventarisasi aset daerah
							Penelusuran dan penyelesaian status aset daerah (kendaraan, tanah dan bangunan)
							Penetapan ganti rugi penggunaan aset daerah

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Strategi	Kebijakan
							Peningkatan manajemen aset dan Pengembangan aplikasi sistem informasi manajemen aset daerah
							Melaksanakan proses penghapusan aset sesuai usulan SKPD
							Memfasilitasi pemeliharaan aset daerah (kendaraan dan bangunan)
							Memfasilitasi pengadaan lelang SKPD melalui Unit Layanan Pengadaan
						Meningkatkan proses dan kualitas penyusunan laporan keuangan daerah	Verifikasi dan validasi SPJ
							Pengiriman SPJ dari SKPD tepat waktu
							Meningkatkan koordinasi untuk meminimalisasi kesalahan SPJ
							Pendampingan penyusunan laporan keuangan SKPD
							Pemantauan pelaksanaan dan evaluasi penerapan <i>accrual basis</i>

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Strategi	Kebijakan
							Penyusunan laporan pertanggungjawaban APBD, Laporan Keuangan Daerah dan Laporan realisasi APBD tepat waktu
							Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait penggunaan dana tugas pembantuan dalam rangka penyusunan laporan dana tugas pembantuan
							Akurasi data realisasi APBD yang berasal dari APBD
							Meningkatkan koordinasi dengan BPD dalam rangka pengelolaan kas daerah
							Meningkatkan koordinasi intensif dengan inspektorat dan BPK untuk meraih dan mempertahankan opini WTP atas laporan keuangan Pemerintah Daerah sampai 2021

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Strategi	Kebijakan
						Mengoptimalkan sistem informasi pengelolaan keuangan sehingga dapat memberikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pengembangan aplikasi sistem pengelolaan keuangan daerah mulai dari penganggaran, penatausahaan dan pelaporan yang berbasis accrual
							Pemeliharaan aplikasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah
						Penyusunan dan penyempurnaan regulasi pengelolaan keuangan dan aset daerah	Penyusunan draf regulasi pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai ketentuan legal drafting yang berlaku
							Penyampaian aturan baru atau perubahan aturan tentang pengelolaan keuangan dan aset kepada pemangku kepentingan pengelolaan keuangan dan aset daerah
			Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Capaian target PAD	30%	Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang dikelola DPKAD	Memfasilitasi pemanfaatan aset daerah oleh masyarakat
							Pemeliharaan aset daerah
							Publikasi pemanfaatan aset daerah

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Strategi	Kebijakan
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	78,67	Meningkatkan fungsi pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang keuangan dan aset daerah	Melaksanakan pembinaan pengelolaan keuangan pengelola BLUD
						Meningkatkan pelayanan kesekretariatan	Membuat dan mengelola dokumen penjaminan kepegawaian
							Fasilitasi hak-hak kepegawaian
							Fasilitasi penyediaan sarana kerja dan pemeliharaan
							Pengelolaan dokumen dan arsip BKAD
						Meningkatkan kualitas SDM dan pelayanan prima di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah	Melakukan analisis kebutuhan diklat dan workshop
							Meningkatkan kualitas pelayanan penyajian data melalui website
			Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah			Menyempurnakan prosedur dan standar operasional untuk memberikan kepastian pelayanan dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak	Penerapan peraturan pusat tentang sistem dan prosedur administrasi pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Strategi	Kebijakan
							Meningkatkan pelayanan pajak dan retribusi secara tepat waktu dan jumlah
						Intensifikasi PAD	Melakukan sosialisasi tentang peraturan pajak dan retribusi daerah
							Melakukan Pemantauan dan pembinaan wajib pajak daerah
							Menyusun kajian potensi pajak daerah
							Melaksanakan pemeriksaan pajak daerah
							Pembayaran pajak panutan
							Melakukan penelitian SSPD dan BPHTB
						Ekstensifikasi Pajak Daerah	Melakukan pendaftaran wajib pajak baru
						Memanfaatkan teknologi informasi secara optimal untuk meningkatkan pelayanan pajak daerah	Up date sistem pendapatan daerah untuk meningkatkan pelayanan pajak daerah

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Strategi	Kebijakan
							Peningkatan kompetensi petugas pajak daerah
							Melakukan pemutakhiran data subjek pajak dan objek pajak secara periodik
						Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang dikelola BKAD	Memfasilitasi pemanfaatan aset daerah oleh masyarakat
							Pemeliharaan aset daerah
	Meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan, aksesibilitas dan kemampuan ekonomi rakyat, serta penanggulangan kemiskinan	Meningkatkan investasi daerah pada BUMD	Realisasi investasi pada BUMD	Realisasi penyertaan modal	100%	Pendayagunaan BUMD dalam mendorong meningkatkan perekonomian daerah	Menyusun kajian penyertaan modal BUMD

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKPd
KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2018

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)		
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.05.01	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH												158.306.752.007,00	113.607.784.792,00	(44.698.967.215,00)
1.02.10.3.00.05.01	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika												167.636.000,00	152.672.000,00	(14.964.000,00)
1.02.10.3.00.05.01.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase OPD yang terkoneksi jaringan komputer, Jumlah publikasi informasi melalui media online, Jumlah lelang pengadaan barang jasa, Persentase menara dan tiang telekomunikasi yang berijin	75%, 325 publikasi, 250 lelang, 80%										52.169.000,00	37.205.000,00	(14.964.000,00)
1.02.10.3.00.05.01.15.009	Pengelolaan Website			Updating informasi di website	12 bulan	Updating informasi di website	12 bulan	Kepuasan pengunjung website	0 orang	Kepuasan pengunjung website	0 orang	Kabupaten Sleman	52.169.000,00	37.205.000,00	(14.964.000,00)
								Persentase informasi yang di website	0 %	Persentase informasi yang di website	0 %				
1.02.10.3.00.05.01.19	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Jumlah modul layanan pemerintahan berbasis TIK, Jumlah modul layanan publik (masyarakat) yang berbasis TIK, Jumlah layanan pemda berbasis teknologi informasi yang terintegrasi, Persentase peningkatan layanan informasi berbasis teknologi	20 layanan, 40 layanan, 15, 76%										115.467.000,00	115.467.000,00	0,00
1.02.10.3.00.05.01.19.003	Pengelolaan Sistem Informasi Penggajian			Peremajaan data gaji	9806 PNS	Peremajaan data gaji	9806 PNS					Kabupaten Sleman	115.467.000,00	115.467.000,00	0,00
				Pencetakan daftar gaji	130 set	Pencetakan daftar gaji	130 set								
				Dokumen rekapitulasi kenaikan gaji berkala PNS	49 SKPD	Dokumen rekapitulasi kenaikan gaji berkala PNS	49 SKPD								
1.02.18.3.00.05.01	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan												362.211.500,00	211.168.500,00	(151.043.000,00)
1.02.18.3.00.05.01.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Persentase jumlah dokumen arsip yang mempunyai nilai guna yang diselamatkan.	20%										362.211.500,00	211.168.500,00	(151.043.000,00)
1.02.18.3.00.05.01.16.006	Pengelolaan Dokumen SKPD			Pengelolaan arsip aktif dan in aktif	12 bulan	Pengelolaan arsip aktif dan in aktif	12 bulan	Persentase pengelolaan arsip SKPD sesuai dengan sistem kearsipan pola baru (SKPB)	90 %	Persentase pengelolaan arsip SKPD sesuai dengan sistem kearsipan pola baru (SKPB)	90 %	Kabupaten Sleman	304.260.500,00	153.502.500,00	(150.758.000,00)
				Penilaian arsip yang diusulkan	2 berkas	Penilaian arsip yang diusulkan	2 berkas								
				Daftar arsip yang akan diusulkan untuk dimusnahkan	2 berkas	Daftar arsip yang akan diusulkan untuk dimusnahkan	2 berkas								
				Pemusnahan arsip	1 berkas	Pemusnahan arsip	1 berkas								
				Updating database buku dan dokumen perpustakaan	12 bulan	Updating database buku dan dokumen perpustakaan	12 bulan								
RKPD: BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH															

hal 1

SKPD BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH															
Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)		
				Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.18.3.00.05.01.16.008	Penyelenggaraan penyusutan arsip			Jumlah arsip yang disusutkan	300 boks	Jumlah arsip yang disusutkan	300 boks	Pelayanan administrasi perkantoran lancar	90 %	Pelayanan administrasi perkantoran lancar	90 %	Kabupaten Sleman	57.951.000,00	57.666.000,00	(285.000,00)
3.00.01.3.00.05.01	Urusan Sekretariat Daerah												184.357.600,00	101.185.000,00	(83.172.600,00)
3.00.01.3.00.05.01.20	Program peningkatan kualitas pelayanan publik	Persentase unit pelayanan publik (UPP) yang memiliki standar pelayanan (SP),Persentase tindak lanjut pengaduan sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Pelayanan, Pengelolaan, dan Penanganan Aduan	45 %, 100%										184.357.600,00	101.185.000,00	(83.172.600,00)
3.00.01.3.00.05.01.20.079	Pembinaan kinerja kelembagaan PPK-BLUD			Pembinaan Pengelola BLUD	27 BLUD	Pembinaan Pengelola BLUD	27 BLUD	Meningkatnya kualitas pelayanan	90 %	Meningkatnya kualitas pelayanan	90 %	Kabupaten Sleman	101.185.000,00	101.185.000,00	0,00
3.00.03.3.00.05.01	Urusan Inspektorat			Pembinaan Pengelola BLUD	2 kali	Pembinaan Pengelola BLUD	2 kali								
3.00.03.3.00.05.01.15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase unit kerja dengan tingkat akuntabilitas minimal A, Jumlah SKPD yang mendapat pembinaan menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani)	60 %, 11 jumlah SKPD										26.700.000,00	106.700.000,00	80.000.000,00
3.00.03.3.00.05.01.15.018	Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi			Monitoring SOP	2 kali	Monitoring SOP	2 kali	Persentase meningkatnya pelayanan	80 %	Persentase meningkatnya pelayanan	80 %	Kabupaten Sleman	26.700.000,00	106.700.000,00	80.000.000,00
3.00.04.3.00.05.01	Urusan Perencanaan			Laporan pelaksanaan roadmap reformasi birokrasi sesuai perbup Nomor 44 Tahun 2015	1 dokumen	Laporan pelaksanaan roadmap reformasi birokrasi sesuai perbup Nomor 44 Tahun 2015	1 dokumen								
3.00.04.3.00.05.01.19	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Persentase dokumen kajian perencanaan ekonomi yang diimplementasikan	33,33 %										87.500.000,00	48.337.000,00	(39.163.000,00)
3.00.04.3.00.05.01.19.025	Perencanaan Pengembangan Investasi			Analisis penyertaan modal kepada PT. BPD DIY	1 dokumen (20 buku)	Analisis penyertaan modal kepada PT. BPD DIY	1 dokumen (20 buku)	Optimalisasi pelaksanaan investasi daerah	90 %	Optimalisasi pelaksanaan investasi daerah	90 %	Kabupaten Sleman	87.500.000,00	48.337.000,00	(39.163.000,00)
3.00.05.3.00.05.01	Urusan Keuangan			Dokumen draft Raperda Perubahan Perda Penyertaan Modal PT. BPD DIY	1 dokumen	Dokumen draft Raperda Perubahan Perda Penyertaan Modal PT. BPD DIY	1 dokumen								
3.00.05.3.00.05.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100%										41.984.563.954,00	41.845.950.954,00	(138.613.000,00)

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.05.3.00.05.01.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Tunjangan Pengelola anggaran/bendahara	19 orang	Tunjangan Pengelola anggaran/bendahara	19 orang	Persentase tertib administrasi pengelola keuangan SKPD	100 %	Persentase tertib administrasi pengelola keuangan SKPD	100 %	Kabupaten Sleman	175.400.000,00	172.320.000,00	(3.080.000,00)
				Tunjangan pengurus barang	9 orang	Tunjangan pengurus barang	9 orang								
				Tunjangan PPK	1 orang	Tunjangan PPK	1 orang								
				Tunjangan verifikator	1 orang	Tunjangan verifikator	1 orang								
				Tunjangan PBB	1 orang	Tunjangan PBB	1 orang								
3.00.05.3.00.05.01.01.024	Penyediaan jasa keamanan dan Kebersihan			Pengadaan Jasa keamanan	1 lembaga	Pengadaan Jasa keamanan	1 lembaga	Meningkatnya keamanan dan kebersihan kantor	80 %	Meningkatnya keamanan dan kebersihan kantor	80 %	Kabupaten Sleman	452.500.000,00	411.603.000,00	(40.897.000,00)
				Pengadaan Jasa Kebersihan	1 Lembaga	Pengadaan Jasa Kebersihan	1 Lembaga								
3.00.05.3.00.05.01.01.025	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran			Makan Minum Rapat	40 kali	Makan Minum Rapat	40 kali	Persentase pemenuhan kebutuhan rapat dan tamu	100 %	Persentase pemenuhan kebutuhan rapat dan tamu	100 %	Kabupaten Sleman	41.356.663.954,00	41.262.027.954,00	(94.636.000,00)
				Makan dan minum tamu	30 kali	Makan dan minum tamu	30 kali								
				Perjalanan dinas dalam daerah	50 kali	Perjalanan dinas dalam daerah	50 kali	Penyelesaian maksud perjalanan dinas	100 %	Penyelesaian maksud perjalanan dinas	100 %				
				Perjalanan dinas luar daerah	15 kali	Perjalanan dinas luar daerah	15 kali								
				Surat Masuk	7000 surat	Surat Masuk	7000 surat	Administrasi perkantoran	100 %	Administrasi perkantoran	100 %				
				Surat Keluar	7000 surat	Surat Keluar	7000 surat								
				ATK	1 Paket	ATK	1 Paket	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa langganan	100 %	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa langganan	100 %				
				Materai, perangko	7200 buah	Materai, perangko	7200 buah								
				Penghias ruangan	2 macam	Penghias ruangan	2 macam	Cakupan area kantor yang terjaga kebersihannya	100 %	Cakupan area kantor yang terjaga kebersihannya	100 %				
				Jasa paket dan pengiriman	1 Paket	Jasa paket dan pengiriman	1 Paket								
				Cetak jilid	10 jenis	Cetak jilid	10 jenis	Jumlah laporan gangguan keamanan lingkungan	0 %	Jumlah laporan gangguan keamanan lingkungan	0 %				
				Penggandaan	20000 lembar	Penggandaan	20000 lembar								
				Langganan telepon	12 bulan	Langganan telepon	12 bulan								
				Langganan air	12 bulan	Langganan air	12 bulan								
				Langganan listrik dan LPJU	12 bulan	Langganan listrik dan LPJU	12 bulan								
				Langganan surat kabar	5 media	Langganan surat kabar	5 media								
				Pelayanan kebersihan	5 orang	Pelayanan kebersihan	5 orang								
					12 bulan		12 bulan								
				Pelayanan keamanan kantor	5 orang	Pelayanan keamanan kantor	5 orang								
					12 bulan		12 bulan								
3.00.05.3.00.05.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	75%										1.240.958.000,00	1.314.058.000,00	73.100.000,00
3.00.05.3.00.05.01.02.033	Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair			Peralatan listrik	0 jenis	Peralatan listrik	0 jenis	Prosentase perlengkapan dan peralatan gedung dalam kondisi baik	90 %	Prosentase perlengkapan dan peralatan gedung dalam kondisi baik	90 %	Kabupaten Sleman	1.240.958.000,00	1.314.058.000,00	73.100.000,00
				Perbaikan mesin ketik	4 unit	Perbaikan mesin ketik	4 unit								
				Perbaikan AC	6 unit	Perbaikan AC	6 unit								
				Pemeliharaan komputer, laptop, CCTV	15 unit	Pemeliharaan komputer, laptop, CCTV	15 unit								
				Pemeliharaan meubelair	20 unit	Pemeliharaan meubelair	20 unit	Cakupan area kantor dalam kondisi baik	90 %	Cakupan area kantor dalam kondisi baik	90 %				
				Penggantian keramik	239 m2	Penggantian keramik	239 m2								
				Pemeliharaan kendaraan roda dua	18 unit	Pemeliharaan kendaraan roda dua	18 unit								
				Pemeliharaan kendaraan roda empat	11 unit	Pemeliharaan kendaraan roda empat	11 unit								
Pembelian BBM	21410 liter	Pembelian BBM	21410 liter												
3.00.05.3.00.05.01.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	93%										267.203.000,00	267.203.000,00	0,00

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.05.3.00.05.01.05.009	Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai			Peserta yang mengikuti bimtek, seminar, lokakarya	15 orang	Peserta yang mengikuti bimtek, seminar, lokakarya	15 orang	Persentase jumlah pegawai yang telah mengikuti bimtek	90 %	Persentase jumlah pegawai yang telah mengikuti bimtek	90 %	Kabupaten Sleman	267.203.000,00	267.203.000,00	0,00
				Pelatihan kantor sendiri	2 kali	Pelatihan kantor sendiri	2 kali								
				Buku penjagaan kenaikan gaji berkala	1 dokumen	Buku penjagaan kenaikan gaji berkala	1 dokumen								
				Buku penjagaan kenaikan pangkat	1 dokumen	Buku penjagaan kenaikan pangkat	1 dokumen								
				Laporan penyusunan SKP	1 dokumen	Laporan penyusunan SKP	1 dokumen								
				Laporan usulan kenaikan pangkat	1 dokumen	Laporan usulan kenaikan pangkat	1 dokumen	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100 %	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100 %				
				Laporan usulan gaji berkala	1 dokumen	Laporan usulan gaji berkala	1 dokumen								
				Laporan rekapan absensi pegawai	1 dokumen	Laporan rekapan absensi pegawai	1 dokumen								
				Laporan penyelesaian ijin cuti	1 dokumen	Laporan penyelesaian ijin cuti	1 dokumen								
Laporan penilaian angka kredit	1 dokumen	Laporan penilaian angka kredit	1 dokumen												
3.00.05.3.00.05.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu	100%										85.274.000,00	84.656.000,00	(618.000,00)
3.00.05.3.00.05.01.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			Laporan realisasi fisik tahun berjalan (RFK bulanan)	12 dokumen	Laporan realisasi fisik tahun berjalan (RFK bulanan)	12 dokumen	Nilai LAKIP SKPD	0 kategori baik	Nilai LAKIP SKPD	0 kategori baik	Kabupaten Sleman	48.912.000,00	53.072.000,00	4.160.000,00
				Laporan tahunan n-1	1 dokumen	Laporan tahunan n-1	1 dokumen								
				Lakip n-1	1 dokumen	Lakip n-1	1 dokumen								
				Laporan capaian indikator kinerja sasaran per triwulan dalam e-sakip tahun berjalan	4 dokumen	Laporan capaian indikator kinerja sasaran per triwulan dalam e-sakip tahun berjalan	4 dokumen								
				Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja SKPD (form I4)	1 dokumen	Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja SKPD (form I4)	1 dokumen	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	90 %	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	90 %				
				Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan renja SKPD (form G9)	1 dokumen	Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan renja SKPD (form G9)	1 dokumen								
				Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja SKPD (form H4)	4 dokumen	Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja SKPD (form H4)	4 dokumen								
				Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap hasil renja SKPD (form i5)	4 dokumen	Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap hasil renja SKPD (form i5)	4 dokumen								
				Dokumen evaluasi terhadaop hasil renstra SKPD (form I4)	1 dokumen	Dokumen evaluasi terhadaop hasil renstra SKPD (form I4)	1 dokumen								
3.00.05.3.00.05.01.06.005	Penyusunan perencanaan kerja SKPD			Dokumen Renja n-1	2 dokumen	Dokumen Renja n-1	2 dokumen	Tertib administrasi pengelolaan keuangan dan pelaporan	100 %	Tertib administrasi keuangan dan pelaporan	100 %	Kabupaten Sleman	36.362.000,00	31.584.000,00	(4.778.000,00)
				Dokumen perubahan Renja tahun n	1 dokumen	Dokumen perubahan Renja tahun n	1 dokumen								
				Rencana kerja tahun n+1	1 dokumen	Rencana kerja tahun n+1	1 dokumen								
				Dokumen perjanjian tahun n	1 dokumen	Dokumen perjanjian tahun n	1 dokumen								
				RKA tahun n+1	1 dokumen	RKA tahun n+1	1 dokumen								
				RKA perubahan tahun n	1 dokumen	RKA perubahan tahun n	1 dokumen								
				DPA perubahan tahun n	1 dokumen	DPA perubahan tahun n	1 dokumen								
				DPA	1 dokumen	DPA	1 dokumen								

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.05.3.00.05.01.15	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dengan baik dan benar, Presentase SKPD yang tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)/aset daerah, Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%, 100%, 100%										96.379.925.553,00	49.401.197.838,00	(46.978.727.715,00)
3.00.05.3.00.05.01.15.001	Penyusunan analisa standar belanja			Analisis standar belanja	1 dokumen	Analisis standar belanja	1 dokumen	Meningkatnya obyektivitas dan rasionalitas rencana keuangan daerah	80 %	Meningkatnya obyektivitas dan rasionalitas rencana keuangan daerah	80 %	Kabupaten Sleman	70.460.000,00	70.460.000,00	0,00
3.00.05.3.00.05.01.15.002	Penyusunan standar barang dan jasa			SBHJ 2018	1 dokumen	SBHJ 2019	1 dokumen	Adanya keseragaman harga pada dokumen	80 %	Adanya keseragaman harga pada dokumen	80 %	Kabupaten Sleman	155.345.000,00	235.104.250,00	79.759.250,00
3.00.05.3.00.05.01.15.006	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD			Perda APBD tahun 2018	1 Perda APBD 2018	Perda APBD tahun 2018	1 Perda APBD 2018	Meningkatnya obyektivitas dan rasionalitas rencana keuangan	100 %	Meningkatnya obyektivitas dan rasionalitas rencana keuangan	100 %	Kabupaten Sleman	644.204.500,00	628.920.000,00	(15.284.500,00)
				Perbup APBD tahun 2018	1 Perbup APBD 2018	Perbup APBD tahun 2018	1 Perbup APBD 2018								
				Rancangan Perda APBD Tahun 2018	1 Rancangan Perda	Rancangan Perda APBD Tahun 2018	1 Rancangan Perda								
				Rancangan Perbup Tahun 2018	1 Rancangan Perbup	Rancangan Perbup Tahun 2018	1 Rancangan Perbup								
				RKA APBD 2018	48 dokumen	RKA APBD 2018	48 dokumen								
3.00.05.3.00.05.01.15.008	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD			Perda P-APBD tahun 2018	1 Perda PAPBD 2017	Perda P-APBD tahun 2018	1 Perda PAPBD 2017	Meningkatkan obyektivitas dan rasionalitas rencana keuangan daerah	100 %	Meningkatkan obyektivitas dan rasionalitas rencana keuangan daerah	100 %	Kabupaten Sleman	527.824.000,00	527.824.000,00	0,00
				Perbup P-APBD tahun 2018	1 Perbup PAPBD 2017	Perbup P-APBD tahun 2018	1 Perbup PAPBD 2017								
				RKA P-APBD 2018	48 dokumen	RKA P-APBD 2018	48 dokumen								
3.00.05.3.00.05.01.15.012	Penyusunan Sistem informasi keuangan daerah			Update software perencanaan keuangan daerah	1 software	Update software perencanaan keuangan daerah	1 software	Meningkatkan kinerja perencanaan keuangan daerah	80 %	Meningkatkan kinerja perencanaan keuangan daerah	80 %	Kabupaten Sleman	435.444.000,00	394.000.000,00	(41.444.000,00)
				Update software penerbitan SP2D	1 software	Update software penerbitan SP2D	1 software								
3.00.05.3.00.05.01.15.014	Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah			Sosialisasi paket regulasi tentang pajak daerah dan retribusi daerah	8 kali	Sosialisasi paket regulasi tentang pajak daerah dan retribusi daerah	8 kali	Meningkatnya pemahaman peraturan perpajakan	80 %	Meningkatnya pemahaman peraturan perpajakan	80 %	Kabupaten Sleman	143.233.500,00	243.233.500,00	100.000.000,00
3.00.05.3.00.05.01.15.016	Peningkatan manajemen aset/barang daerah			Laporan pemanfaatan aset daerah	1 dokumen	Laporan pemanfaatan aset daerah	1 dokumen	Pemanfaatan aset secara optimal	70 %	Pemanfaatan aset secara optimal	70 %	Kabupaten Sleman	35.647.000,00	78.569.000,00	42.922.000,00
3.00.05.3.00.05.01.15.017	Peningkatan manajemen investasi daerah			Evaluasi penyertaan modal	1 dokumen	Evaluasi penyertaan modal	1 dokumen	Meningkatkan Tertib Administrasi pendokumentasian, dan pengelolaan penyertaan modal	90 %	Meningkatkan Tertib Administrasi pendokumentasian, dan pengelolaan penyertaan modal	90 %	Kabupaten Sleman	91.090.000,00	78.569.000,00	(12.521.000,00)
				Laporan rekonsiliasi atas penyertaan modal, pengelolaan penyertaan modal, dan evaluasi perjanjian kerjasama dengan PDAM dan BPD	3 dokumen	Laporan rekonsiliasi atas penyertaan modal, pengelolaan penyertaan modal, dan evaluasi perjanjian kerjasama dengan PDAM dan BPD	3 dokumen								
3.00.05.3.00.05.01.15.026	Penyusunan Laporan Tugas Pembantuan			Laporan keuangan tugas pembantuan dan laporan keuangan urusan bersama	8 laporan	Laporan keuangan tugas pembantuan dan laporan keuangan urusan bersama	8 laporan	Transparansi pengelolaan keuangan meningkat	80 %	Transparansi pengelolaan keuangan meningkat	80 %	Kabupaten Sleman	39.335.000,00	39.335.000,00	0,00
3.00.05.3.00.05.01.15.028	Penyusunan petunjuk pelaksanaan APBD			Perbup tentang petunjuk pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah	1 dokumen	Perbup tentang petunjuk pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah	1 dokumen	Kepastian hukum pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	80 %	Kepastian hukum pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	80 %		36.254.900,00	36.914.500,00	659.600,00

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.05.3.00.05.01.15.033	Pengelolaan SPT Masa dan Tahunan (PPH 21)			Data SPT Masa dan SPT Tahunan PPh 21 Tahun 2016 se Kabupaten Sleman	12000 PNS Kabupaten Sleman Tahun 2016	Data SPT Masa dan SPT Tahunan PPh 21 Tahun 2016 se Kabupaten Sleman	12000 PNS Kabupaten Sleman Tahun 2016	kesesuaian data pajak pegawai	100 %	kesesuaian data pajak pegawai	100 %	Kabupaten Sleman	115.000.000,00	112.750.000,00	(2.250.000,00)
				Laporan PPN dan PPh penyedia barang dan jasa	1 laporan	Laporan PPN dan PPh penyedia barang dan jasa	1 laporan								
3.00.05.3.00.05.01.15.035	Pengelolaan Pos Bantuan Keuangan			Bantuan keuangan untuk kebutuhan masyarakat	12 bulan	Bantuan keuangan untuk kebutuhan masyarakat	12 bulan	Pemenuhan kebutuhan masyarakat	80 %	Pemenuhan kebutuhan masyarakat	80 %	Kabupaten Sleman	62.220.000,00	52.220.000,00	(10.000.000,00)
3.00.05.3.00.05.01.15.036	Pengadaan Tanah			Tanah jalan dan jembatan	8 lokasi	Tanah jalan dan jembatan	8 lokasi	Penyediaan fasum dan prasarana pelayanan masyarakat	90 %	Penyediaan fasum dan prasarana pelayanan masyarakat	90 %	Kabupaten Sleman	80.437.551.553,00	22.120.886.088,00	(58.316.665.465,00)
				Tanah akses perkantoran	1 lokasi	Tanah akses perkantoran	1 lokasi								
				Tanah stadion Maguwoharjo	1 lokasi	Tanah stadion Maguwoharjo	1 lokasi								
						Kecamatan Minggir	1 lokasi								
				Museum vulcano	1 lokasi										
3.00.05.3.00.05.01.15.037	Pengadaan Kendaraan Dinas, peralatan, mesin, mebelair, dan perlengkapan			Kendaraan Roda 4	30 buah	Kendaraan Roda 4	30 buah	Pemenuhan kebutuhan kendaraan	100 %	Pemenuhan kebutuhan kendaraan	100 %	Kabupaten Sleman	5.000.000.000,00	17.448.984.500,00	12.448.984.500,00
				Kendaraan roda dua	60 buah	Kendaraan roda dua	60 buah								
				Laptop	19 buah	Laptop	19 buah								
				Komputer	17 buah	Komputer	17 buah								
				Printer	16 buah	Printer	16 buah								
				AC	11 buah	AC	11 buah								
				Filling Kabinat	17 buah	Filling Kabinat	17 buah								
				LCD	3 buah	LCD	3 buah								
				TV	3 buah	TV	3 buah								
				Mesin Antrian	1 buah	Mesin Antrian	1 buah								
				Brankas	1 buah	Brankas	1 buah								
				Almari besi	12 buah	Almari besi	12 buah								
				Mesin Perforasi	1 buah	Mesin Perforasi	1 buah								
				Mesin ketik manual	8 buah	Mesin ketik manual	8 buah								
				Lemari Es	1 buah	Lemari Es	1 buah								
				Kursi susun/rapat	100 buah	Kursi susun/rapat	100 buah								
				Mesin Potong rumput	7 buah	Mesin Potong rumput	7 buah								
				Mesin Faximili	4 buah	Mesin Faximili	4 buah								
				Digital alat ganti pemain	1 buah	Digital alat ganti pemain	1 buah								
				Hand splayer	4 buah	Hand splayer	4 buah								
						Almari besi	12 buah								
						Hi Ace	1 unit								
						Fortuner	1 unit								
						Pick Up (Disbud + PU)	2 unit								
						PC/Laptop	12 unit								
						Laptop i.7 (Bappeda)	3 unit								
						Printer LQ besar	2 unit								
						TV	1 unit								
						Brankas	1 unit								
						Karpet masjid agung	1 unit								
						Scanner perppus	30 unit								
						Printer LX perpus	30 unit								
						Sound masjid agung	1 unit								
						Scan arsip BKAD	1 unit								
						Kamera (Arsip BKAD + Bappeda)	2 unit								
						Kendaraan roda 2 (Bappeda, 125 CC)	8 unit								

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.05.3.00.05.01.15.040	Pengamanan dan Pemeliharaan barang daerah			Perbaikan berat kendaraan dinas dan perbaikan gedung di luar kewenangan instansi selama 2017	10 item pemeliharaan	Perbaikan berat kendaraan dinas dan perbaikan gedung di luar kewenangan instansi selama 2017	10 item pemeliharaan	Barang milik daerah terpelihara dengan aman	75 %	Barang milik daerah terpelihara dengan aman	75 %	Kabupaten Sleman	450.000.000,00	644.000.000,00	194.000.000,00
				Pengamanan barang milik daerah	0 Tanah, sertifikat tanah, dan BPKB	Pengamanan barang milik daerah	0 Tanah, sertifikat tanah, dan BPKB								
3.00.05.3.00.05.01.15.041	Penyusunan RKBMD			Dokumen RKBU/RKPBU/RKPBU/RTPBU 2017	4 dokumen	Dokumen RKBU/RKPBU/RKPBU/RTPBU 2017	4 dokumen	Rencana pengadaan dan pemeliharaan barang/aset daerah	100 %	Rencana pengadaan dan pemeliharaan barang/aset daerah	100 %	Kabupaten Sleman	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
3.00.05.3.00.05.01.15.042	Penghapusan aktiva tetap			Penghapusan Aset (Bangunan, Kendaraan, Peralatan mesin)	10 laporan atau buku	Penghapusan Aset (Bangunan, Kendaraan, Peralatan mesin)	10 laporan atau buku	Efisiensi biaya pengelolaana aset daerah	70 %	Efisiensi biaya pengelolaana aset daerah	70 %	Kabupaten Sleman	113.149.500,00	150.089.500,00	36.940.000,00
3.00.05.3.00.05.01.15.045	Penyusunan dan Pengesahan DPA, DPPA dan DPAL			DPA APBD Tahun 2017	500 buku	DPA APBD Tahun 2017	500 buku	Acuan pelaksanaan kegiatan	100 %	Acuan pelaksanaan kegiatan	100 %	Kabupaten Sleman	401.585.000,00	392.982.500,00	(8.602.500,00)
				DPPA APBD 2017	500 buku	DPPA APBD 2017	500 buku								
				DPA APBD Tahun 2018	500 buku	DPA APBD Tahun 2018	500 buku								
3.00.05.3.00.05.01.15.046	Penyusunan Anggaran Kas			Cash Budget APBD 2017	1 kali	Cash Budget APBD 2017	1 kali	Referensi likuiditas kas Pemda	100 %	Referensi likuiditas kas Pemda	100 %	Kabupaten Sleman	14.088.000,00	12.241.000,00	(1.847.000,00)
				Cah Budget PAPBD 2017	1 kali	Cah Budget PAPBD 2017	1 kali								
				Penerbitan surat penyediaan Dana (SPD)	5 kali	Penerbitan surat penyediaan Dana (SPD)	5 kali								
3.00.05.3.00.05.01.15.051	Penyelesaian Status Hukum Kepemilikan Aset Daerah			Balik nama kepemilikan kendaraan	2 BPKB	Balik nama kepemilikan kendaraan	2 BPKB	Status kepemilikan Aset Jelas	75 %	Status kepemilikan Aset Jelas	75 %	Kabupaten Sleman	201.000.000,00	201.000.000,00	0,00
				Berita acara hibah/Ruislag	3 BA	Berita acara hibah/Ruislag	3 BA								
3.00.05.3.00.05.01.15.052	Pengelolaan SIM Aset			Tersedia database barang milik daerah	2 aplikasi	Database barang milik daerah	2 aplikasi	Data Sim Aset Real Time	48 Instansi	Data Sim Aset Real Time	48 Instansi	Kabupaten Sleman	140.000.000,00	172.000.000,00	32.000.000,00
								Data Persediaan Real Time	48 Instansi	Data Persediaan Real Time	48 Instansi				
3.00.05.3.00.05.01.15.056	Analisis data dan penerbitan SP2D			Penelitian SPM	1200 SPM	Penelitian SPM	1200 SPM	Pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan (jadwal dan anggaran)	90 %	Pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan (jadwal dan anggaran)	90 %	Kabupaten Sleman	92.750.000,00	165.368.000,00	72.618.000,00
				Penerbitan SP2D	1200 SP2D	Penerbitan SP2D	1200 SP2D								
3.00.05.3.00.05.01.15.059	Pengelolaan dan Pengendalian Dana Transfer dan Bagi Hasil Propinsi			Pencairan dana transfer pusat	4 kali	Pencairan dana transfer pusat	4 kali	Pengelolaan dan pengendalian dana transfer	100 %	Pengelolaan dan pengendalian dana transfer	100 %	Kabupaten SLeman	62.000.000,00	62.000.000,00	0,00
				Pencairan dana transfer propinsi	4 kali	Pencairan dana transfer propinsi	4 kali								
				Pelaporan realisasi penggunaan dana transfer	4 kali	Pelaporan realisasi penggunaan dana transfer	4 kali								
3.00.05.3.00.05.01.15.062	Validasi SPJ					Validasi dan rekonsiliasi perangkat daerah	12 bulan			akuntabilitas dan responsibilitas pengelolaan keuangan meningkat	90%	Kabupaten Sleman	54.650.000,00	54.650.000,00	0,00
3.00.05.3.00.05.01.15.063	Pengelolaan DBH Cukai dan Pajak Rokok			Realisasi pemanfaatan DBH Cukai Tembakau dan Pajak Rokok sesuai dengan peraturan yang berlaku	1 kali perencanaan DBH Cukai	Realisasi pemanfaatan DBH Cukai Tembakau dan Pajak Rokok sesuai dengan peraturan yang berlaku	1 kali perencanaan DBH Cukai	Tertib pengelolaan keuangan daerah	80 %	Tertib pengelolaan keuangan daerah	80 %	Kabupaten Sleman	23.597.000,00	23.597.000,00	0,00
					2 laporan penggunaan		2 laporan penggunaan								
3.00.05.3.00.05.01.15.068	Pelaporan administrasi gaji dan pembinaan pengelola gaji			Laporan gaji pegawai ke Taperum, BPJS Kesehatan, Taspen	13 kali	Laporan gaji pegawai ke Taperum, BPJS Kesehatan, Taspen	13 kali	Ketepatan waktu pelaporan gaji dan pengkartuan	100 %	Ketepatan waktu pelaporan gaji dan pengkartuan	100 %	Kabupaten Sleman	102.500.000,00	94.575.000,00	(7.925.000,00)
3.00.05.3.00.05.01.15.071	Penyusunan laporan dan penyelesaian permasalahan barang daerah			Laporan penyelesaian barang hilang	2 dokumen	Laporan penyelesaian barang hilang	2 dokumen	Laporan barang milik daerah yang tertib dan teratur	90 %	Laporan barang milik daerah yang tertib dan teratur	90 %	Kabupaten Sleman	125.118.500,00	218.325.000,00	93.206.500,00
				Laporan hasil evaluasi	2 laporan	Laporan hasil evaluasi	2 laporan								
				Pembinaan pengelola barang daerah	3 kali	Pembinaan pengelola barang daerah	3 kali								

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.05.3.00.05.01.15.072	Pendampingan penyusunan laporan keuangan SKPD			Pendampingan pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan SKPD	48 SKPD	Pendampingan pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan SKPD	48 SKPD	Meningkatnya kemampuan SKPD menyusun laporan keuangan sesuai peraturan yang berlaku	80 %	Meningkatnya kemampuan SKPD menyusun laporan keuangan sesuai peraturan yang berlaku	80 %	Kabupaten Sleman	306.530.000,00	299.900.000,00	(6.630.000,00)
3.00.05.3.00.05.01.15.073	REkonsiliasi data keuangan daerah			Rekap data SP2D dan Rekap data penerimaan non Pendapatan	2 laporan	Rekap data SP2D dan Rekap data penerimaan non Pendapatan	2 laporan	Data penerimaan daerah terupdate	95 %	Data penerimaan daerah terupdate	95 %		38.737.200,00	33.737.200,00	(5.000.000,00)
					36 buku		36 buku								
3.00.05.3.00.05.01.15.075	Pendampingan program hibah			Terealisasinya reimburse dana hibah	3 laporan	Terealisasinya reimburse dana hibah	3 laporan	Tercukupi kebutuhan sanitasi	90 %	Tercukupi kebutuhan sanitasi	90 %	Kabupaten Sleman	145.000.000,00	125.000.000,00	(20.000.000,00)
				Terealisasinya reimburse dana hibah sanitasi	30 dokumen	Terealisasinya reimburse dana hibah sanitasi	30 dokumen								
				Terealisasinya reimburse dana hibah sanitasi	4 kali sosialisasi	Terealisasinya reimburse dana hibah sanitasi	4 kali sosialisasi	Tercukupi kebutuhan air minum	90 %	Tercukupi kebutuhan air minum	90 %				
				Terealisasinya reimburse dana hibah air minum	3 kali	Terealisasinya reimburse dana hibah air minum	3 kali								
				Terealisasinya reimburse dana hibah air minum	30 dokumen	Terealisasinya reimburse dana hibah air minum	30 dokumen								
				Terealisasinya reimburse dana hibah air minum	4 kali sosialisasi	Terealisasinya reimburse dana hibah air minum	4 kali sosialisasi								
3.00.05.3.00.05.01.15.076	Penyusunan laporan realisasi APBD			Laporan bulanan	8 laporan	Laporan bulanan	8 laporan	Akurasi pertanggungjawaban pemerintah meningkat	80 %	Akurasi pertanggungjawaban pemerintah meningkat	80 %	Kabupaten Sleman	265.000.000,00	265.000.000,00	0,00
				Laporan triwulan I dan III	2 laporan	Laporan triwulan I dan III	2 laporan								
				Laporan semester dan prognosis	1 laporan	Laporan semester dan prognosis	1 laporan								
				Laporan realisasi APBD semester I	1 laporan	Laporan realisasi APBD semester I	1 laporan								
				Laporan penjabaran realisasi APBD semester I	1 laporan	Laporan penjabaran realisasi APBD semester I	1 laporan								
3.00.05.3.00.05.01.15.080	Penyelesaian Permasalahan Penatausahaan Keuangan					Penyelesaian permasalahan keuangan	1 dokumen			AKuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat	95%	Kabupaten Sleman	21.408.000,00	21.408.000,00	0,00
3.00.05.3.00.05.01.15.082	Pengelolaan administrasi, penyimpanan, dan distribusi barang milik daerah			Distribusi barang	54 SKPD	Distribusi barang	54 SKPD	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	50 %	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	50 %	Kabupaten Sleman	39.474.600,00	38.997.000,00	(477.600,00)
3.00.05.3.00.05.01.15.083	Sensus barang milik daerah			Hasil sensus barang milik daerah	2 dokumen	Hasil sensus barang milik daerah	2 dokumen	Data barang yang akurat	75 %	Data barang yang akurat	75 %	Kabupaten Sleman	1.600.848.000,00	1.557.184.000,00	(43.664.000,00)
3.00.05.3.00.05.01.15.092	Verifikasi dana penguatan modal			Data usulan/estimasi penyaluran dana penguatan modal	1 dokumen	Data usulan/estimasi penyaluran dana penguatan modal	1 dokumen	Persentase pencairan meningkat	90 %	Persentase pencairan meningkat	90 %	Kabupaten Sleman	60.500.000,00	1.557.184.000,00	1.496.684.000,00
				Berita acara Penetapan penyaluran dana penguatan modal	40 set	Berita acara Penetapan penyaluran dana penguatan modal	40 set								
				SK penetapan penerima dan besaran dana penguatan modal	40 set	SK penetapan penerima dan besaran dana penguatan modal	40 set								
3.00.05.3.00.05.01.15.093	Penyusunan laporan realisasi penerimaan dan belanja daerah			Laporan realisasi dana perimbangan	12 laporan	Laporan realisasi dana perimbangan	12 laporan	Informasi realisasi penerimaan daerah dan bahan evaluasi PAD	95 %	Informasi realisasi penerimaan daerah dan bahan evaluasi PAD	95 %	Kabupaten Sleman	48.500.000,00	48.500.000,00	0,00
				Feedback PAD per SKPD	12 Laporan	Feedback PAD per SKPD	12 Laporan								

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.05.3.00.05.01.15.100	Penyusunan regulasi keuangan daerah			Data piutang dana penguatan modal by name by address	12 laporan	Draft peraturan pengelolaan keuangan	6 draft	Meningkatnya akurasi data penguatan modal	0	Bahan pengelolaan keuangan daerah	100%	Kabupaten Sleman	114.640.000,00	114.640.000,00	0,00
				Updating sistem komputerisasi dana penguatan modal	1 paket			meningkatnya tertib administrasi pengelolaan dana penguatan modal	80 %						
				Laporan rencana bisnis dan anggaran UPT Pengelolaan Dana Penguatan Modal	2 dokumen			Meningkatnya tertib administrasi perencanaan dan pengelolaan keuangan BLUD	90 %						
3.00.05.3.00.05.01.15.106	Penyusunan laporan keuangan daerah			Perda pertanggungjawaban APBD 2016	2 kali	Perda pertanggungjawaban APBD 2017	2 kali	Transparansi pengelolaan keuangan daerah pemerintah kabupaten sleman meningkat	90 %	Transparansi pengelolaan keuangan daerah pemerintah kabupaten sleman meningkat	90 %	Kabupaten Sleman	493.438.200,00	487.858.500,00	(5.579.700,00)
				Perbup penjabaran pertanggungjawaban APBD 2016	2 kali	Perbup penjabaran pertanggungjawaban APBD 2017	2 kali								
				Laporan keuangan 2016	2 dokumen	Laporan keuangan 2017	2 dokumen								
3.00.05.3.00.05.01.15.108	Pengendalian KASda			Perjanjian pengelolaan idie cash	11 perjanjian kerjasama	Perjanjian pengelolaan idie cash	11 perjanjian kerjasama	Likuiditas kasda terkendali	100 %	Likuiditas kasda terkendali	100 %	Kabupaten Sleman	58.000.000,00	67.952.500,00	9.952.500,00
				Laporan rekonsiliasi bank	12 laporan	Laporan rekonsiliasi bank	12 laporan								
3.00.05.3.00.05.01.15.111	Penatausahaan keuangan dan aset SKPD			Dokumen laporan keuangan semester I dan II	2 dokumen	Dokumen laporan keuangan semester I dan II	2 dokumen	Persentase dokumen laporan keuangan dan aset SKPD tepat waktu	85 %	Persentase dokumen laporan keuangan dan aset SKPD tepat waktu	85 %	Kabupaten Sleman	89.210.500,00	77.057.500,00	(12.153.000,00)
				Dokumen laporan aset/BMD semester I dan II	2 dokumen	Dokumen laporan aset/BMD semester I dan II	2 dokumen								
3.00.05.3.00.05.01.15.116	Evaluasi Kebijakan Anggaran dan Penyusunan Instruksi Anggaran			Rekomendasi atas kebijakan pelaksanaan APBD 2018	1 kali	Rekomendasi atas kebijakan pelaksanaan APBD 2018	1 kali	Tersedianya acuan perencanaan anggaran	100 %	Tersedianya acuan perencanaan anggaran	100 %	Kabupaten Sleman	80.079.000,00	59.968.700,00	(20.110.300,00)
				Instruksi PAPBD 2017 dan APBD 2018	1 kali	Instruksi PAPBD 2017 dan APBD 2018	1 kali								
3.00.05.3.00.05.01.15.117	Penyusunan Regulasi Keuangan Daerah			Draft peraturan	4 dokumen			Tertib pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	90 %				128.127.500,00	0,00	(128.127.500,00)
3.00.05.3.00.05.01.15.119	Verifikasi dan klarifikasi penerangan jalan umum (PJU)			Verifikasi tagihan PJU	12 bulan	Verifikasi tagihan PJU	12 bulan	Pembayaran tagihan rekening PJU tertib	85 %	Pembayaran tagihan rekening PJU tertib	85 %	Kabupaten Sleman	103.035.000,00	90.000.000,00	(13.035.000,00)
3.00.05.3.00.05.01.15.120	Pelayanan pemanfaatan aset daerah											Kabupaten Sleman	113.172.600,00	83.172.600,00	(30.000.000,00)
3.00.05.3.00.05.01.15.121	Pelaporan Informasi Keuangan Daerah			Perkiraan belanja operasi, belanja modal, transfer bagi hasil pendapatan, dan transfer bantuan keuangan	12 dokumen	Perkiraan belanja operasi, belanja modal, transfer bagi hasil pendapatan, dan transfer bantuan keuangan	12 dokumen	Perkiraan belanja operasi, belanja modal, transfer bagi hasil pendapatan, dan transfer bantuan keuangan	100 %	Perkiraan belanja operasi, belanja modal, transfer bagi hasil pendapatan, dan transfer bantuan keuangan	100 %	Kabupaten Sleman	43.928.000,00	34.000.000,00	(9.928.000,00)
				Laporan posisi kas bulanan	12 dokumen	Laporan posisi kas bulanan	12 dokumen	Laporan posisi kas bulanan	100 %	Laporan posisi kas bulanan	100 %				
				Ringkasan realisasi bulanan	12 dokumen	Ringkasan realisasi bulanan	12 dokumen	Ringkasan realisasi bulanan	100 %	Ringkasan realisasi bulanan	100 %				
3.00.05.3.00.05.01.15.122	Analisis Validitas Data pembayaran LS kepada pihak ketiga			Kesesuaian belanja pembayaran LS kepada pihak ketiga	100 %	Kesesuaian belanja pembayaran LS kepada pihak ketiga	100 %	Tertib pengelolaan keuangan daerah	100 %	Tertib pengelolaan keuangan daerah	100 %	Kabupaten Sleman	123.418.000,00	136.040.000,00	12.622.000,00
3.00.05.3.00.05.01.18	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase deviasi realisasi PAD terhadap target	5%										20.491.426.500,00	20.074.656.500,00	(416.770.000,00)
3.00.05.3.00.05.01.18.001	Pendaftaran wajib pajak daerah			Wajib pajak baru	550 WP	Wajib pajak baru	550 WP	Persentase kenaikan pajak baru yang terdaftar	12 %	Persentase kenaikan pajak baru yang terdaftar	12 %	Kabupaten Sleman	294.190.000,00	222.190.000,00	(72.000.000,00)
3.00.05.3.00.05.01.18.007	Penetapan pajak			Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)	22750 Ketetapan	Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)	22750 Ketetapan	Presentase kenaikan pajak baru yang terdaftar	100 %	Presentase kenaikan pajak baru yang terdaftar	100 %	Kabupaten Sleman	170.000.000,00	152.985.600,00	(17.014.400,00)

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.05.3.00.05.01.18.010	Penagihan Pajak daerah			Pajak daerah yang tertagih Laporan penerimaan dan tunggakan pajak daerah Laporan rekonsiliasi data penerimaan pajak daerah Draft SK Bupati Alokasi dan bagi Hasil Pajak Daerah dan retribusi daerah	10 jenis 12 dokumen 12 dokumen (BA) 3 SK Bupati	Pajak daerah yang tertagih Laporan penerimaan dan tunggakan pajak daerah Laporan rekonsiliasi data penerimaan pajak daerah Draft SK Bupati Alokasi dan bagi Hasil Pajak Daerah dan retribusi daerah	10 jenis 12 dokumen 12 dokumen (BA) 3 SK Bupati	Presentase penerimaan Pajak Daerah tercapai	100 %	Presentase penerimaan Pajak Daerah tercapai	100 %	Kabupaten Sleman	795.000.000,00	718.560.000,00	(76.440.000,00)
3.00.05.3.00.05.01.18.015	Evaluasi PAD			Evaluasi penerimaan PAD	12 Dokumen	Evaluasi penerimaan PAD	12 Dokumen	Target PAD tercapai	100 %	Target PAD tercapai	100 %	Kabupaten Sleman	112.683.000,00	112.683.000,00	0,00
3.00.05.3.00.05.01.18.035	Pengelolaan sistem informasi pajak Sleman (SIMPAMAN)			Laporan data Wajib Pajak Pelayanan Wajib Pajak	6 jenis 12 bulan	Laporan data Wajib Pajak Pelayanan Wajib Pajak	6 jenis 12 bulan	Presentase pembayaran Pajak Daerah	100 %	Presentase pembayaran Pajak Daerah	100 %	Kabupaten Sleman	263.050.000,00	187.846.000,00	(75.204.000,00)
3.00.05.3.00.05.01.18.036	Penyampaian SPPT PBB			Cetak SPPT PBB-2 Verifikasi SPPT OBB-P2 Penyampaian SPPT PBB-P2 yang diterbitkan secara masal Pemantauan dan Evaluasi penyampaian SPPT PBB-P2	620000 SPPT 620000 SPPT 620000 SPPT 12 kali	Cetak SPPT PBB-2 Verifikasi SPPT OBB-P2 Penyampaian SPPT PBB-P2 yang diterbitkan secara masal Pemantauan dan Evaluasi penyampaian SPPT PBB-P2	620000 SPPT 620000 SPPT 620000 SPPT 12 kali	Presentase penerimaan PBB P2	70 %	Presentase penerimaan PBB P2	70 %	Kabupaten Sleman	1.483.867.000,00	1.491.983.000,00	8.116.000,00
3.00.05.3.00.05.01.18.044	Pelayanan permohonan keringanan pajak daerah			SK keberatan, pengurangan, keringanan, penghapusan, sanksi administrasi pajak daerah	500 SK	SK keberatan, pengurangan, keringanan, penghapusan, sanksi administrasi pajak daerah	500 SK	Presentase penerimaan pajak daerah dari SK yang diterbitkan	100 %	Presentase penerimaan pajak daerah dari SK yang diterbitkan	100 %	Kabupaten Sleman	156.169.500,00	133.964.400,00	(22.205.100,00)
3.00.05.3.00.05.01.18.045	Penagihan PBB			PBB P2 th 2017 Terbayar Rekonsiliasi PBB Penyampaian hadiah lunas awal Pembinaan petugas PBB	75 % 12 bulan 2 kali 1 kali	PBB P2 th 2017 Terbayar Rekonsiliasi PBB Penyampaian hadiah lunas awal Pembinaan petugas PBB	75 % 12 bulan 2 kali 1 kali	Presentase penerimaan target PBB P2	100 %	Presentase penerimaan target PBB P2	100 %	Kabupaten Sleman	6.305.705.000,00	7.066.332.500,00	760.627.500,00
3.00.05.3.00.05.01.18.047	Penelitian SSPD dan BPHTB			Validasi SSPD BPHTB	12500 Objek Pajak	Validasi SSPD BPHTB	12500 Objek Pajak	Presentase BPHTB	100 %	Presentase BPHTB	100 %	Kabupaten Sleman	212.470.000,00	451.734.000,00	239.264.000,00
3.00.05.3.00.05.01.18.049	Pendampingan intensifikasi PPh OPDN			Bagi hasil DPH OPDN	47750000000	Bagi hasil DPH OPDN	47750000000	Presentase Bagi Hasil DPH yang diterima PEMDA	75 %	Presentase Bagi Hasil DPH yang diterima PEMDA	75 %	Kabupaten Sleman	183.645.000,00	170.521.500,00	(13.123.500,00)
3.00.05.3.00.05.01.18.052	Penyekenggaraan Administrasi PBB			Analisis data PBB P2 SK NJOP PBB Administrasi PBB	1 dokumen 1 dokumen 86 dokumen	Analisis data PBB P2 SK NJOP PBB Administrasi PBB	1 dokumen 1 dokumen 86 dokumen	Presentase SK NJOP yang ditetapkan	100 %	Presentase SK NJOP yang ditetapkan	100 %	Kabupaten Sleman	1.204.860.000,00	1.204.860.000,00	0,00
3.00.05.3.00.05.01.18.057	Pemutakhiran data subyek pajak dan obyek pajak			Pemutakhiran data PBB Aplikasi zona nilai tanah	20000 OP 1 paket	Pemutakhiran data PBB Aplikasi zona nilai tanah	20000 OP 1 paket	Data subjek dan Objek PBB uptodate, kesesuaian peta blok PBB Data Petak Blok PBB P2 Uptodate	80 % 70 %	Data subjek dan Objek PBB uptodate, kesesuaian peta blok PBB Data Petak Blok PBB P2 Uptodate	80 % 70 %	Kabupaten Sleman	1.375.727.900,00	3.594.895.000,00	2.219.167.100,00
3.00.05.3.00.05.01.18.059	Pemanfaatan dan publikasi sarana dan prasarana olahraga			Publikasi dan pemasaran sarana dan prasarana olahraga melalui media	6 jenis	Publikasi dan pemasaran sarana dan prasarana olahraga melalui media	6 jenis	Jumlah Peningkatan PAD dari sektor	0 10 %	Jumlah Peningkatan PAD dari sektor	0 10 %	Kabupaten Sleman	181.012.000,00	181.012.000,00	0,00
3.00.05.3.00.05.01.18.060	Pemeriksaan Wajib Pajak Daerah			Dokumen pemeriksaan WP dan dokumen pemeriksaan KAP	40 LHP	Dokumen pemeriksaan WP dan dokumen pemeriksaan KAP	40 LHP	Persentase kepatuhan WP yang diperiksa	80 %	Persentase kepatuhan WP yang diperiksa	80 %	Kabupaten Sleman	241.694.000,00	257.954.000,00	16.260.000,00
3.00.05.3.00.05.01.18.061	Pendataan, pemantauan dan pembinaan Wajib Pajak Daerah			Verifikasi SPTPD Pemantauan WP Pembinaan WP	25 234 kali 96 kali	Verifikasi SPTPD Pemantauan WP Pembinaan WP	25 234 kali 96 kali					Kabupaten Sleman	400.047.500,00	351.982.500,00	(48.065.000,00)
3.00.05.3.00.05.01.18.063	Kajian potensi pendapatan daerah			Dokumen kajian potensi pajak/retribusi daerah	2 kajian	Dokumen kajian potensi pajak/retribusi daerah	2 kajian	Data kajian pengambilan kebijakan tersedia	70 %	Data kajian pengambilan kebijakan tersedia	70 %	Kabupaten Sleman	3.559.652.800,00	98.273.000,00	(3.461.379.800,00)

SKPD		BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH													
Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator				Manfaat/Outcome				Lokasi	Dana (Rp 000)		
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.05.3.00.05.01.18.064	Pengelolaan Sarana Prasarana Olahraga			Pemeliharaan sarana olahraga	4 sarana olahraga	Pemeliharaan sarana olahraga	4 sarana olahraga	Tingkat pemanfaatan sarana	0	Tingkat pemanfaatan sarana	0	Kabupaten Sleman	3.551.652.800,00	3.676.880.000,00	125.227.200,00
								Menambah umur ekonomis	80 %	Menambah umur ekonomis	80 %				
TOTAL													158.306.752.007,00	113.607.784.792,00	(44.698.967.215,00)

Lampiran 3
PENETAPAN KINERJA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TAHUN 2018

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN
Meningkatnya akuntabilitas kinerja daerah	Predikat LAKIP	A	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan	85.631.000
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	51.192.000
			Penyusunan perencanaan kerja SKPD	34.439.000
			Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	106.700.000
			Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi	106.700.000
Meningkatnya akuntabilitas keuangan daerah	Opini BPK terhadap LKD	WTP	Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	67.132.590.988
			Penyusunan analisa standar belanja	70.460.000
			Penyusunan standar barang dan jasa	235.104.250
			Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	628.920.000
			Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	527.577.500
			Penyusunan Sistem informasi keuangan daerah	394.000.000
			Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	243.233.500
			Peningkatan manajemen aset/barang daerah	30.647.000
			Peningkatan manajemen investasi daerah	78.569.900
			Penyusunan Laporan Tugas Pembantuan	39.335.000
			Penyusunan petunjuk pelaksanaan APBD	39.914.500
			Pengelolaan SPT Masa dan Tahunan (PPH 21)	112.750.000
			Pengelolaan Pos Bantuan Keuangan	52.220.000
			Pengadaan Tanah	36.652.116.088
			Pengadaan Kendaraan Dinas, peralatan, mesin, mebelair, dan perlengkapan	21.005.445.800
			Pengamanan dan Pemeliharaan barang daerah	719.000.000
			Penyusunan RKBMD	45.000.000
			Penghapusan aktiva tetap	150.089.500

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN
			Penyusunan dan Pengesahan DPA, DPPA dan DPAL	392.382.500
			Penyusunan Anggaran Kas	12.241.000
			Penyelesaian Status Hukum Kepemilikan Aset Daerah	251.000.000
			Pengelolaan SIM Aset	172.000.000
			Analisis data dan penerbitan SP2D	165.368.000
			Analisis Data dan penerbitan SKPP	33.240.000
			Pengelolaan dan Pengendalian Dana Transfer dan Bagi Hasil Propinsi	62.000.000
			Validasi SPJ	54.593.000
			Pengelolaan DBH Cukai dan Pajak Rokok	23.597.000
			Pelaporan administrasi gaji dan pembinaan pengelola gaji	94.575.000
			Penyusunan laporan dan penyelesaian permasalahan barang daerah	194.025.000
			Pendampingan penyusunan laporan keuangan SKPD	299.900.000
			Rekonsiliasi data keuangan daerah	33.737.200
			Pendampingan program hibah	125.000.000
			Penyusunan laporan realisasi APBD	265.000.000
			Penyelesaian Permasalahan Penatausahaan Keuangan	21.408.000
			Pengelolaan administrasi, penyimpanan, dan distribusi barang milik daerah	38.997.000
			Sensus barang milik daerah	1.557.184.000
			Verifikasi dana penguatan modal	1.193.998.000
			Penyusunan laporan realisasi penerimaan dan belanja daerah	48.500.000
			Penyusunan Regulasi Keuangan Daerah	116.585.000
			Penyusunan Laporan Keuangan Daerah	487.858.500
			Pengendalian KASda	67.952.500
			Penatausahaan keuangan dan aset SKPD	77.057.500
			Evaluasi Kebijakan Anggaran dan Penyusunan Instruksi Anggaran	59.968.750
			Penyusunan Regulasi Keuangan Daerah	0
			Verifikasi dan klarifikasi penerangan jalan umum (PJU)	90.000.000
			Pelaporan Informasi Keuangan Daerah	34.000.000
			Analisis Validitas Data pembayaran LS kepada pihak ketiga	136.040.000
Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Capaian target PAD	32%	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	20.223.751.500
			Pendaftaran wajib pajak daerah	222.190.000
			Penetapan pajak	152.985.600
			Penagihan Pajak daerah	718.560.000

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN
			Evaluasi PAD	247.683.000
			Pengelolaan sistem informasi pajak Sleman (SIMPAMAN)	187.846.000
			Penyampaian SPPT PBB	1.506.078.000
			Pelayanan permohonan keringanan pajak daerah	133.964.400
			Penagihan PBB	7.066.332.500
			Penelitian SSPD dan BPHTB	451.734.000
			Pendampingan intensifikasi PPh OPDN	170.521.500
			Penyekenggaraan Administrasi PBB	1.204.860.000
			Pemutakhiran data subyek pajak dan obyek pajak	3.594.895.000
			Pemanfaatan dan publikasi sarana dan prasarana olahraga	181.012.000
			Pemeriksaan Wajib Pajak Daerah	257.954.000
			Pendataan, pemantauan dan pembinaan Wajib Pajak Daerah	351.982.500
			Kajian potensi pendapatan daerah	98.273.000
			Pengelolaan Sarana Prasarana Olahraga	3.676.880.000
Meningkat nya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	78,8	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	184.357.600
			Pembinaan kinerja kelembagaan PPK BLUD	101.185.000
			Pelayanan pemanfaatan aset daerah	83.172.600
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	41.845.950.954
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	172.320.000
			Penyediaan jasa keamanan dan Kebersihan	411.603.000
			Penunjang pelayanan administrasi perkantoran	41.262.027.954
			Program Peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur	1.314.058.000
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair	1.314.058.000
			Program Peningkatan Kapasitas sumber Daya Aparatur	267.203.000
			Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai	267.203.000

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN
			Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip daerah	206.773.500
			Pengelolaan Dokumen SKPD	148.822.500
			Penyelenggaraan penyusutan arsip	57.951.000
			Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	43.113.000
			Pengelolaan Website	43.113.000
			Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	115.467.000
			Pengelolaan Sistem Informasi Penggajian	115.467.000
Tercapaian ya penyertaan modal daerah	Realisasi penyertaan modal	100%	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	48.337.000
			Perencanaan Pengembangan Investasi	48.337.000

**PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
SKPD : BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TAHUN 2018**

Kode	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana	Realisasi	Prosentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian	Nilai Capaian Program/ Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8
3.00.05.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
3.00.05.3.00.05.01.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Masukan :					100,00
		- Dana	Rp.	172.320.000,00	163.990.000,00	95,17	
		Keluaran :					
		1. Tunjangan Pengelola anggaran/bendahara	orang	19,00	19,00	100,00	
		2. Tunjangan pengurus barang	orang	9,00	9,00	100,00	
		3. Tunjangan PPK	orang	1,00	1,00	100,00	
		4. Tunjangan verifikator	orang	1,00	1,00	100,00	
		5. Tunjangan PBB	orang	1,00	1,00	100,00	
		Hasil :					
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran							
3.00.05.3.00.05.01.01.024	Penyediaan jasa keamanan dan Kebersihan	Masukan :					100,00
		- Dana	Rp.	411.603.000,00	402.529.244,00	97,80	
		Keluaran :					
		1. Pengadaan Jasa keamanan	lembaga	1,00	1,00	100,00	
		2. Pengadaan Jasa Kebersihan	Lembaga	1,00	1,00	100,00	
		Hasil :					
		Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran					
3.00.05.3.00.05.01.01.025	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran	Masukan :					100,00
		- Dana	Rp.	41.262.027.954,00	40.735.814.677,00	98,72	
		Keluaran :					
		1. Makan Minum Rapat	kali	40,00	40,00	100,00	
		2. Makan dan minum tamu	kali	30,00	30,00	100,00	
		3. Perjalanan dinas dalam daerah	kali	50,00	50,00	100,00	
		4. Perjalanan dinas luar daerah	kali	15,00	15,00	100,00	
		5. Surat Masuk	surat	7.000,00	7.000,00	100,00	
		6. Surat Keluar	surat	7.000,00	7.000,00	100,00	
		7. ATK	Paket	1,00	1,00	100,00	
		8. Materai, perangko	buah	7.200,00	7.200,00	100,00	
		9. Penghias ruangan	macam	2,00	2,00	100,00	
		10. Jasa paket dan pengiriman	Paket	1,00	1,00	100,00	
		11. Cetak jilid	jenis	10,00	10,00	100,00	
		12. Penggandaan	lembar	20.000,00	20.000,00	100,00	
		13. Langganan telepon	bulan	12,00	12,00	100,00	
		14. Langganan air	bulan	12,00	12,00	100,00	
		15. Langganan listrik dan LPJU	bulan	12,00	12,00	100,00	
		16. Langganan surat kabar	media	5,00	5,00	100,00	
		17. Pelayanan kebersihan	orang	5,00	5,00	100,00	
		18.	bulan	12,00	12,00	100,00	
		19. Pelayanan keamanan kantor	orang	5,00	5,00	100,00	
		20.	bulan	12,00	12,00	100,00	
		Hasil :					
		Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran					
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program)						98,70	
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program)							100,00
3.00.05.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur						
3.00.05.3.00.05.01.02.033	Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair	Masukan :					87,50
		- Dana	Rp.	1.314.058.000,00	713.295.111,00	54,28	
		Keluaran :					
		2. Perbaikan mesin ketik	unit	4,00	4,00	100,00	
		3. Perbaikan AC	unit	6,00	6,00	100,00	
		4. Pemeliharaan komputer, laptop, CCTV	unit	15,00	15,00	100,00	
5. Pemeliharaan meubelair	unit	20,00	20,00	100,00			

Kode	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana	Realisasi	Prosentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian	Nilai Capaian Program/ Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8
		6. Penggantian keramik	meter persegi	239,00	0,00	0,00	
		7. Pemeliharaan kendaraan roda dua	unit	18,00	18,00	100,00	
		8. Pemeliharaan kendaraan roda empat	unit	11,00	11,00	100,00	
		9. Pembelian BBM	liter	21.410,00	21.410,00	100,00	
		Hasil :					
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran							
	Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program)					54,28	
	Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program)						87,50
3.00.05.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur						
3.00.05.3.00.05.01.05.009	Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai	Masukan :					
		- Dana	Rp.	267.203.000,00	181.962.500,00	68,10	
		Keluaran :					
		1. Peserta yang mengikuti bimtek, seminar, lokakarya	orang	15,00	15,00	100,00	
		2. Pelatihan kantor sendiri	kali	2,00	2,00	100,00	
		3. Buku penjagaan kenaikan gaji berkala	dokumen	1,00	1,00	100,00	
		4. Buku penjagaan kenaikan pangkat	dokumen	1,00	1,00	100,00	
		5. Laporan penyusunan SKP	dokumen	1,00	1,00	100,00	
		6. Laporan usulan kenaikan pangkat	dokumen	1,00	1,00	100,00	
		7. Laporan usulan gaji berkala	dokumen	1,00	1,00	100,00	
		8. Laporan rekapan absensi pegawai	dokumen	1,00	1,00	100,00	
		9. Laporan penyelesaian ijin cuti	dokumen	1,00	1,00	100,00	
		10. Laporan penilaian angka kredit	dokumen	1,00	1,00	100,00	
	Hasil :						
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran							100,00
	Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program)					68,10	
	Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program)						100,00
3.00.05.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan						
3.00.05.3.00.05.01.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Masukan :					
		- Dana	Rp.	51.192.000,00	44.202.000,00	86,35	
		Keluaran :					
		1. Laporan realisasi fisik tahun berjalan (RFK bulanan)	dokumen	12,00	12,00	100,00	
		2. Laporan tahunan n-1	dokumen	1,00	1,00	100,00	
		3. Lakip n-1	dokumen	1,00	1,00	100,00	
		4. Laporan capaian indikator kinerja sasaran per triwulan dalam e-sakip tahun berjalan	dokumen	4,00	4,00	100,00	
		5. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja SKPD (form I4)	dokumen	1,00	1,00	100,00	
		6. Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan renja SKPD (form G9)	dokumen	1,00	1,00	100,00	
		7. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja SKPD (form H4)	dokumen	4,00	4,00	100,00	
		8. Pengendalian dan evaluasi terhadap hasil renja SKPD (form i5)	dokumen	4,00	4,00	100,00	
		9. Evaluasi terhadap hasil renstra SKPD (form I4)	dokumen	1,00	1,00	100,00	
		Hasil :					
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran							100,00
3.00.05.3.00.05.01.06.005	Penyusunan perencanaan kerja SKPD	Masukan :					100,00
		- Dana	Rp.	34.439.000,00	31.814.000,00	92,38	
		Keluaran :					
		1. Dokumen Renja n-1	dokumen	2,00	2,00	100,00	
		2. Dokumen perubahan Renja tahun n	dokumen	1,00	1,00	100,00	

Kode	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana	Realisasi	Prosentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian	Nilai Capaian Program/ Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8
		3. Rencana kerja tahun n+1	dokumen	1,00	1,00	100,00	
		4. Dokumen perjanjian tahun n	dokumen	1,00	1,00	100,00	
		5. RKA tahun n+1	dokumen	1,00	1,00	100,00	
		6. RKA perubahan tahun n	dokumen	1,00	1,00	100,00	
		7. DPA perubahan tahun n	dokumen	1,00	1,00	100,00	
		8. DPA	dokumen	1,00	1,00	100,00	
		Hasil :					
		Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran					
	Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program)					88,77	
	Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program)						100,00
1.02.10.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa						
1.02.10.3.00.05.01.15.009	Pengelolaan Website	Masukan :					100,00
		- Dana	Rp.	37.205.000,00	34.910.000,00	93,83	
		Keluaran :					
		1. Updating informasi di website	kali	24,00	24,00	100,00	
		Hasil :					
		Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran					
	Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program)					93,83	
	Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program)						100,00
3.00.03.15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH						
3.00.03.3.00.05.01.15.018	Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi	Masukan :					100,00
		- Dana	Rp.	106.700.000,00	61.919.200,00	58,03	
		Keluaran :					
		1. Monitoring SOP	kali	2,00	2,00	100,00	
		2. Laporan pelaksanaan roadmap reformasi birokrasi sesuai perbup Nomor 44 Tahun 2015	dokumen	1,00	1,00	100,00	
		Hasil :					
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran							
	Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program)					58,03	
	Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program)						100,00
3.00.05.15	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah						
3.00.05.3.00.05.01.15.001	Penyusunan analisa standar belanja	Masukan :					100,00
		- Dana	Rp.	70.460.000,00	64.197.500,00	91,11	
		Keluaran :					
		1. Analisis standar belanja	dokumen	1,00	1,00	100,00	
		Hasil :					
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran							
3.00.05.3.00.05.01.15.002	Penyusunan standar barang dan jasa	Masukan :					100,00
		- Dana	Rp.	235.104.250,00	227.168.000,00	96,62	
		Keluaran :					
		1. SBHJ 2018	dokumen	1,00	1,00	100,00	
		Hasil :					
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran							
3.00.05.3.00.05.01.15.006	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Masukan :					100,00
		- Dana	Rp.	628.920.000,00	425.921.750,00	67,72	
		Keluaran :					
		1. Perda APBD tahun 2019	Perda APBD	1,00	1,00	100,00	
		2. Perbup APBD tahun 2019	Perbup APBD	1,00	1,00	100,00	
		3. Rancangan Perda APBD Tahun 2019	Rancangan Perda	1,00	1,00	100,00	
		4. Rancangan Perbup Tahun 2019	Rancangan Perbup	1,00	1,00	100,00	
		5. RKA APBD 2019	dokumen	48,00	48,00	100,00	
Hasil :							

Kode	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana	Realisasi	Prosentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian	Nilai Capaian Program/ Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8		
		Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran							
3.00.05.3.00.05.01.15.008	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	Masukan :							
		- Dana	Rp.	527.577.500,00	396.404.714,00	75,14			
		Keluaran :							
		1. Perda P-APBD tahun 2018	Perda PAPBD	1,00	1,00	100,00			
		2. Perbup P-APBD tahun 2018	Perbup PAPBD	1,00	1,00	100,00			
		3. RKA P-APBD 2018	dokumen	48,00	48,00	100,00			
		Hasil :							
		Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran					100,00		
3.00.05.3.00.05.01.15.012	Penyusunan Sistem informasi keuangan daerah	Masukan :							
		- Dana	Rp.	394.000.000,00	369.941.500,00	93,89			
		Keluaran :							
		1. Update software perencanaan keuangan daerah	software	1,00	1,00	100,00			
		2. Update pengelolaan keuangan daerah	software	1,00	1,00	100,00			
		Hasil :							
		Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran					100,00		
		3.00.05.3.00.05.01.15.014	Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Masukan :					
- Dana	Rp.			234.233.500,00	125.595.999,00	53,62			
Keluaran :									
1. Sosialisasi paket regulasi tentang pajak daerah dan retribusi daerah	kali			12,00	12,00	100,00			
Hasil :									
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran					100,00				
3.00.05.3.00.05.01.15.016	Peningkatan manajemen aset/barang daerah			Masukan :					
				- Dana	Rp.	30.647.000,00	25.740.000,00	83,99	
		Keluaran :							
		1. Laporan pemanfaatan aset daerah	dokumen	1,00	1,00	100,00			
		Hasil :							
		Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran					100,00		
		3.00.05.3.00.05.01.15.017	Peningkatan manajemen investasi daerah	Masukan :					
				- Dana	Rp.	78.569.900,00	61.086.600,00	77,75	
Keluaran :									
1. Evaluasi penyertaan modal	dokumen			1,00	1,00	100,00			
2. Laporan rekonsiliasi atas penyertaan modal, pengelolaan penyertaan modal, dan evaluasi perjanjian kerjasama dengan PDAM dan BPD	dokumen			3,00	3,00	100,00			
Hasil :									
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran					100,00				
3.00.05.3.00.05.01.15.026	Penyusunan Laporan Tugas Pembantuan			Masukan :					
		- Dana	Rp.	39.335.000,00	703.500,00	1,79			
		Keluaran :							
		1. Laporan keuangan tugas pembantuan dan laporan keuangan urusan bersama	laporan	8,00	8,00	100,00			
		Hasil :							
		Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran					100,00		
		3.00.05.3.00.05.01.15.028	Penyusunan petunjuk pelaksanaan APBD	Masukan :					
				- Dana	Rp.	39.914.500,00	36.577.500,00	91,64	
Keluaran :									
1. Perbup tentang petunjuk pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah	dokumen			1,00	1,00	100,00			
Hasil :									
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran					100,00				
3.00.05.3.00.05.01.15.033	Pengelolaan SPT Masa dan Tahunan (PPH 21)			Masukan :					
				- Dana	Rp.	112.750.000,00	109.775.500,00	97,36	
		Keluaran :							
		1. Data SPT Masa dan SPT Tahunan PPh 21 Tahun 2016 se Kabupaten Sleman	PNS Kabupaten Sleman Tahun	12.000,00	12.000,00	100,00			
		2. Laporan PPN dan PPh penyedia barang dan jasa	laporan	1,00	1,00	100,00			
		Hasil :							
		Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran					100,00		
		3.00.05.3.00.05.01.15.035	Pengelolaan Pos Bantuan	Masukan :					
- Dana	Rp.			52.220.000,00	47.409.000,00	90,79	100,00		

Kode	Keuangan Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana	Realisasi	Prosentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian	Nilai Capaian Program/ Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pengadaan Tanah	Keluaran :					
		1. Bantuan keuangan untuk kebutuhan masyarakat	bulan	12,00	12,00	100,00	
		Hasil :					
		Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran					
3.00.05.3.00.05.01.15.036		Masukan :					75,00
		- Dana	Rp.	36.652.116.088,00	23.617.697.921,26	64,44	
		Keluaran :					
		1. Tanah jalan dan jembatan	lokasi	5,00	5,00	100,00	
		2. Tanah akses perkantoran	lokasi	1,00	1,00	100,00	
		3. Tanah Pasar Ngijon	lokasi	1,00	0,00	0,00	
		4. Tanah untuk pasar	lokasi	2,00	2,00	100,00	
		5. Kecamatan Minggir	lokasi	1,00	1,00	100,00	
	6. Museum volcano	lokasi	1,00	1,00	100,00		
	7. Pasar Sleman	Lokasi	1,00	1,00	100,00		
	8. SMP 1 Godean	lokasi	1,00	0,00	0,00		
	Hasil :						
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran							
3.00.05.3.00.05.01.15.037	Pengadaan Kendaraan Dinas, peralatan, mesin, mebelair, dan perlengkapan	Masukan :				100,00	
		- Dana	Rp.	21.005.445.800,00	19.256.639.223,00		91,67
		Keluaran :					
		1. Kendaraan Roda 4	buah	8,00	8,00		100,00
		2. Kendaraan roda dua	buah	20,00	20,00		100,00
		3. Laptop	buah	11,00	11,00		100,00
		4. Komputer	buah	6,00	6,00		100,00
		5. Printer	buah	14,00	14,00		100,00
		6. AC	buah	10,00	10,00		100,00
		7. Filling Kabinat	buah	6,00	6,00		100,00
		8. LCD	buah	3,00	3,00		100,00
		9. TV	buah	3,00	3,00		100,00
		10. Mesin Antrian	buah	1,00	1,00		100,00
		11. Brankas	buah	1,00	1,00		100,00
		12. Almari besi	buah	12,00	12,00		100,00
		13. Mesin Perforasi	buah	1,00	1,00		100,00
		14. Mesin ketik manual	buah	8,00	8,00		100,00
		15. Lemari Es	buah	1,00	1,00		100,00
		16. Kursi susun/rapat	buah	100,00	100,00		100,00
		17. Mesin Potong rumput	buah	7,00	7,00		100,00
		18. Mesin Faximili	buah	4,00	4,00		100,00
		19. Digital alat ganti pemain	buah	1,00	1,00		100,00
		20. Hand splayer	buah	4,00	4,00		100,00
		21. Mesin foto cooy	buah	1,00	1,00		100,00
		22. Almari besi	unit	12,00	12,00		100,00
		23. Hi Ace	unit	1,00	1,00		100,00
		24. Fortuner	unit	1,00	1,00		100,00
		25. PC/Laptop	unit	12,00	12,00		100,00
		26. Pick up (Dis PU dan Kebudayaan)	unit	2,00	2,00		100,00
		27. Printer LQ besar	unit	2,00	2,00		100,00
		28. TV	unit	1,00	1,00		100,00
		29. Brankas	unit	1,00	1,00		100,00
		30. Karpet Masjid Agung	unit	1,00	1,00		100,00
		31. Scanner perpus	unit	30,00	30,00		100,00
		32. Printer LX (perpus)	unit	30,00	30,00		100,00
		33. Sound masjid Agung	unit	1,00	1,00		100,00
		34. Scan (arsip BKAD)	unit	1,00	1,00		100,00
		35. Kamera (arsip BKAD + Bappeda)	unit	2,00	2,00		100,00
		36. Laptop i.7 (bappeda)	unit	3,00	3,00		100,00
		37. Kendaraan roda 2 (Bappeda125 CC)	unit	8,00	8,00		100,00
		Hasil :					
		Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran					
3.00.05.3.00.05.01.15.040	Pengamanan dan Pemeliharaan barang daerah	Masukan :				100,00	
		- Dana	Rp.	719.000.000,00	655.212.673,00		91,13
		Keluaran :					
		1. Perbaikan berat kendaraan dinas dan perbaikan gedung di luar kewenangan instansi selama 2017	item pemeliharaan	10,00	10,00		100,00
		2. Pengamanan barang milik daerah	Tanah, sertifikat tanah, dan BPKB	5,00	5,00		100,00
		Hasil :					

Kode	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana	Realisasi	Prosentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian	Nilai Capaian Program/ Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran					
3.00.05.3.00.05.01.15.041	Penyusunan RKBMD	Masukan :					100,00
		- Dana	Rp.	45.000.000,00	38.150.000,00	84,78	
		Keluaran :					
		1. Dokumen RKBUR/RKPBU/RKPBU/RTPBU 2017	dokumen	4,00	4,00	100,00	
		Hasil :					
		Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran					
3.00.05.3.00.05.01.15.042	Penghapusan aktiva tetap	Masukan :					100,00
		- Dana	Rp.	150.089.500,00	113.471.000,00	75,60	
		Keluaran :					
		1. Penghapusan Aset (Bangunan, Kendaraan, Peralatan mesin)	laporan atau buku	10,00	10,00	100,00	
		Hasil :					
		Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran					
3.00.05.3.00.05.01.15.045	Penyusunan dan Pengesahan DPA, DPPA dan DPAL	Masukan :					100,00
		- Dana	Rp.	392.382.500,00	296.987.000,00	75,69	
		Keluaran :					
		1. DPA APBD Tahun 2017	buku	500,00	500,00	100,00	
		2. DPPA APBD 2017	buku	500,00	500,00	100,00	
		3. DPA APBD Tahun 2018	buku	500,00	500,00	100,00	
		Hasil :					
		Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran					
3.00.05.3.00.05.01.15.046	Penyusunan Anggaran Kas	Masukan :					100,00
		- Dana	Rp.	12.241.000,00	10.070.000,00	82,26	
		Keluaran :					
		1. Cash Budget APBD 2017	kali	1,00	1,00	100,00	
		2. Cah Budget PAPBD 2017	kali	1,00	1,00	100,00	
		3. Penerbitan surat penyediaan Dana (SPD)	kali	5,00	5,00	100,00	
		Hasil :					
		Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran					
3.00.05.3.00.05.01.15.051	Penyelesaian Status Hukum Kepemilikan Aset Daerah	Masukan :					100,00
		- Dana	Rp.	251.000.000,00	170.832.682,00	68,06	
		Keluaran :					
		1. Balik nama kepemilikan kendaraan	BPKB	2,00	2,00	100,00	
		2. Berita acara hibah/Ruislag	BA	3,00	3,00	100,00	
		Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran					
3.00.05.3.00.05.01.15.052	Pengelolaan SIM Aset	Masukan :					100,00
		- Dana	Rp.	172.000.000,00	164.234.700,00	95,49	
		Keluaran :					
		1. Aplikasi database barang milik daerah	aplikasi	2,00	2,00	100,00	
		Hasil :					
		Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran					
3.00.05.3.00.05.01.15.056	Analisis data dan penerbitan SP2D	Masukan :					100,00
		- Dana	Rp.	165.368.000,00	115.101.500,00	69,60	
		Keluaran :					
		1. Penelitian SPM	Surat Perintah Membayar	1.200,00	1.200,00	100,00	
		2. Penerbitan SP2D	Surat Perintah Pencairan Dana	1.200,00	1.200,00	100,00	
		Hasil :					
		Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran					
3.00.05.3.00.05.01.15.057	Analisis Data dan penerbitan SKPP	Masukan :					100,00
		- Dana	Rp.	33.240.000,00	33.238.500,00	100,00	
		Keluaran :					
		1. SKPP	SKPP	600,00	600,00	100,00	
		Hasil :					
		Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran					
3.00.05.3.00.05.01.15.059	Pengelolaan dan Pengendalian Dana Transfer dan Bagi Hasil Propinsi	Masukan :					100,00
		- Dana	Rp.	62.000.000,00	56.878.500,00	91,74	
		Keluaran :					
		1. Pencairan dana transfer pusat	kali	4,00	4,00	100,00	
		2. Pencairan dana transfer propinsi	kali	4,00	4,00	100,00	
3. Pelaporan realisasi penggunaan dana transfer	kali	4,00	4,00	100,00			

Kode	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana	Realisasi	Prosentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian	Nilai Capaian Program/ Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8
		Hasil :					
		Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran					
3.00.05.3.00.05.01.15.062	Validasi SPJ	Masukan :					100,00
		- Dana	Rp.	54.593.000,00	53.253.000,00	97,55	
		Keluaran :					
		1. Validasi SPJ	Perangkat Daerah	48,00	48,00	100,00	
		Hasil :					
		Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran					
3.00.05.3.00.05.01.15.063	Pengelolaan DBH Cukai dan Pajak Rokok	Masukan :					100,00
		- Dana	Rp.	23.597.000,00	23.443.000,00	99,35	
		Keluaran :					
		1. Dokumen pemanfaatan DBH Cukai Tembakau dan Pajak Rokok sesuai dengan peraturan yang berlaku	dokumen	2,00	2,00	100,00	
		Hasil :					
		Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran					
3.00.05.3.00.05.01.15.068	Pelaporan administrasi gaji dan pembinaan pengelola gaji	Masukan :					100,00
		- Dana	Rp.	94.575.000,00	94.388.000,00	99,80	
		Keluaran :					
		1. Laporan gaji pegawai ke Taperum, BPJS Kesehatan, Taspen	kali	13,00	13,00	100,00	
		Hasil :					
		Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran					
3.00.05.3.00.05.01.15.071	Penyusunan laporan dan penyelesaian permasalahan barang daerah	Masukan :					100,00
		- Dana	Rp.	194.025.000,00	154.007.000,00	79,37	
		Keluaran :					
		1. Laporan penyelesaian barang hilang	dokumen	2,00	2,00	100,00	
		2. Laporan hasil evaluasi	laporan	2,00	2,00	100,00	
		3. Pembinaan pengelola barang daerah	kali	3,00	3,00	100,00	
		Hasil :					
		Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran					
3.00.05.3.00.05.01.15.072	Pendampingan penyusunan laporan keuangan SKPD	Masukan :					100,00
		- Dana	Rp.	299.900.000,00	207.780.540,00	69,28	
		Keluaran :					
		1. Pendampingan pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan SKPD	SKPD	48,00	48,00	100,00	
		Hasil :					
		Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran					
3.00.05.3.00.05.01.15.073	Rekonsiliasi data keuangan daerah	Masukan :					100,00
		- Dana	Rp.	33.737.200,00	32.307.500,00	95,76	
		Keluaran :					
		1. Rekap data SP2D dan Rekap data penerimaan non Pendapatan	laporan	2,00	2,00	100,00	
		2.	buku	36,00	36,00	100,00	
		Hasil :					
		Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran					
3.00.05.3.00.05.01.15.075	Pendampingan program hibah	Masukan :					100,00
		- Dana	Rp.	125.000.000,00	113.604.318,00	90,88	
		Keluaran :					
		2. reimburse dana hibah sanitasi	dokumen	1,00	1,00	100,00	
		3. Sosialisasi hibah sanitasi	kali	4,00	4,00	100,00	
		5. reimburse dana hibah air minum	dokumen	30,00	30,00	100,00	
		6. Sosialisasi dana hibah air minum	kali	4,00	4,00	100,00	
		Hasil :					
		Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran					
3.00.05.3.00.05.01.15.076	Penyusunan laporan realisasi APBD	Masukan :					100,00
		- Dana	Rp.	265.000.000,00	193.226.000,00	72,92	
		Keluaran :					
		1. Laporan bulanan	laporan	8,00	8,00	100,00	
		2. Laporan triwulan I dan III	laporan	2,00	2,00	100,00	
		3. Laporan semester dan prognosis	laporan	1,00	1,00	100,00	
		4. Laporan realisasi APBD semester I	laporan	1,00	1,00	100,00	
		5. Laporan penjabaran realisasi APBD semester I	laporan	1,00	1,00	100,00	

Kode	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana	Realisasi	Prosentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian	Nilai Capaian Program/Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8
		Hasil :					
		Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran					
3.00.05.3.00.05.01.15.080	Penyelesaian Permasalahan Penatausahaan Keuangan	Masukan :					
		- Dana	Rp.	21.408.000,00	20.743.212,00	96,89	
		Keluaran :					
		1. Dokumen penyelesaian permasalahan	dokumen	2,00	2,00	100,00	
		Hasil :					
		Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran					100,00
3.00.05.3.00.05.01.15.082	Pengelolaan administrasi, penyimpanan, dan distribusi barang milik daerah	Masukan :					
		- Dana	Rp.	38.997.000,00	35.497.600,00	91,03	
		Keluaran :					
		1. Distribusi barang	SKPD	54,00	54,00	100,00	
		Hasil :					
		Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran					100,00
3.00.05.3.00.05.01.15.083	Sensus barang milik daerah	Masukan :					
		- Dana	Rp.	1.557.184.000,00	1.386.515.610,00	89,04	
		Keluaran :					
		1. Hasil sensus barang milik daerah	dokumen	2,00	2,00	100,00	
		Hasil :					
		Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran					100,00
3.00.05.3.00.05.01.15.092	Verifikasi dana penguatan modal	Masukan :					
		- Dana	Rp.	1.193.998.000,00	1.068.009.753,00	89,45	
		Keluaran :					
		1. Data usulan/estimasi penyaluran dana penguatan modal	dokumen	1,00	1,00	100,00	
		2. Berita acara Penetapan penyaluran dana penguatan modal	set	40,00	40,00	100,00	
		3. SK penetapan penerima dan besaran dana penguatan modal	set	40,00	40,00	100,00	
		4. Pelayanan informasi PDM	orang	600,00	600,00	100,00	
		5. Pelayanan agunan penerima DPM	rorang	100,00	100,00	100,00	
		6. Brosur DPM	lebar	1.000,00	1.000,00	100,00	
		6. Penantatanganan perjanjian penguatan modal	sasaran	600,00	600,00	100,00	
		8. Sewa save deposit	unit	4,00	4,00	100,00	
		9. Forum komunikasi DPM	kali	2,00	2,00	100,00	
		10. Data piutang dana penguatan modal by name by adress	laporan	12,00	12,00	100,00	
		11. Updating sistem komputerisasi dana penguatan modal	paket	1,00	1,00	100,00	
		12. Laporan RBA UPT	dokumen	2,00	2,00	100,00	
		Hasil :					
		Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran					100,00
3.00.05.3.00.05.01.15.093	Penyusunan laporan realisasi penerimaan dan belanja daerah	Masukan :					
		- Dana	Rp.	48.500.000,00	45.655.500,00	94,14	
		Keluaran :					
		1. Laporan realisasi dana perimbangan	laporan	12,00	12,00	100,00	
		2. Feedback PAD per SKPD	Laporan	12,00	12,00	100,00	
		Hasil :					
		Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran					100,00
3.00.05.3.00.05.01.15.100	Penyusunan Regulasi Keuangan Daerah	Masukan :					
		- Dana	Rp.	116.585.000,00	93.321.000,00	80,05	
		Keluaran :					
		1. Draft peraturan pengelolaan keuangan	draft	6,00	6,00	100,00	
		2. Draft Perbup pengadaan barang dan jasa	draft	1,00	1,00	100,00	
		Hasil :					
		Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran					100,00
3.00.05.3.00.05.01.15.106	Penyusunan Laporan Keuangan Daerah	Masukan :					
		- Dana	Rp.	487.858.500,00	394.348.500,00	80,83	
		Keluaran :					
		1. Perda pertanggungjawaban APBD 2017	kali	2,00	2,00	100,00	
		2. Perbup penjabaran pertanggungjawaban APBD 2017	kali	2,00	2,00	100,00	
		3. Laporan keuangan 2017	dokumen	2,00	2,00	100,00	

Kode	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana	Realisasi	Prosentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian	Nilai Capaian Program/ Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8
		Hasil :					
		Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran					
3.00.05.3.00.05.01.15.108	Pengendalian KAsda	Masukan :					
		- Dana	Rp.	67.952.500,00	67.369.500,00	99,14	
		Keluaran :					
		1. Perjanjian pengelolaan idie cash	perjanjian kerjasama	11,00	11,00	100,00	
		2. Laporan rekonsiliasi bank	laporan	12,00	12,00	100,00	
		Hasil :					
		Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran					100,00
3.00.05.3.00.05.01.15.111	Penatausahaan keuangan dan aset SKPD	Masukan :					
		- Dana	Rp.	77.057.500,00	72.951.900,00	94,67	
		Keluaran :					
		1. Dokumen laporan keuangan semester I dan II	dokumen	2,00	2,00	100,00	
		2. Dokumen laporan aset/BMD semester I dan II	dokumen	2,00	2,00	100,00	
		Hasil :					
		Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran					100,00
3.00.05.3.00.05.01.15.116	Evaluasi Kebijakan Anggaran dan Penyusunan Instruksi Anggaran	Masukan :					
		- Dana	Rp.	59.968.750,00	56.653.750,00	94,47	
		Keluaran :					
		1. Rekomendasi atas kebijakan pelaksanaan APBD 2018	kali	1,00	1,00	100,00	
		2. Instruksi PAPBD 2017 dan APBD 2018	kali	1,00	1,00	100,00	
		Hasil :					
		Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran					100,00
3.00.05.3.00.05.01.15.119	Verifikasi dan klarifikasi penerangan jalan umum (PJU)	Masukan :					
		- Dana	Rp.	90.000.000,00	75.140.000,00	83,49	
		Keluaran :					
		1. Verifikasi tagihan PJU	bulan	12,00	12,00	100,00	
		Hasil :					
		Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran					100,00
3.00.05.3.00.05.01.15.121	Pelaporan Informasi Keuangan Daerah	Masukan :					
		- Dana	Rp.	34.000.000,00	31.200.000,00	91,76	
		Keluaran :					
		1. Perkiraan belanja operasi, belanja modal, transfer bagi hasil pendapatan, dan transfer bantuan keuangan	dokumen	12,00	12,00	100,00	
		2. Laporan posisi kas bulanan	dokumen	12,00	12,00	100,00	
		3. Ringkasan realisasi bulanan	dokumen	12,00	12,00	100,00	
		Hasil :					
		Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran					100,00
3.00.05.3.00.05.01.15.122	Analisis Validitas Data pembayaran LS kepada pihak ketiga	Masukan :					
		- Dana	Rp.	136.040.000,00	134.286.500,00	98,71	
		Keluaran :					
		1. Kesesuaian belanja pembayaran LS kepada pihak ketiga	%	100,00	100,00	100,00	
		Hasil :					
		Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran					100,00
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program)						75,64	
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program)							99,44
1.02.18.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah						
1.02.18.3.00.05.01.16.006	Pengelolaan Dokumen SKPD	Masukan :					
		- Dana	Rp.	148.822.500,00	139.911.000,00	94,01	
		Keluaran :					
		1. Pengelolaan arsip aktif dan in aktif	bulan	12,00	12,00	100,00	
		2. Penilaian arsip yang diusulkan	berkas	2,00	2,00	100,00	
		3. Daftar arsip yang akan diusulkan untuk dimusnahkan	berkas	2,00	2,00	100,00	
		4. Pemusnahan arsip	berkas	1,00	1,00	100,00	
		5. Updating database buku dan dokumen perpustakaan	bulan	12,00	12,00	100,00	
		Hasil :					
		Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran					100,00
1.02.18.3.00.05.01.16.008	Penyelenggaraan	Masukan :					100,00

Kode	penyusutan arsip Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana	Realisasi	Prosentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian	Nilai Capaian Program/ Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8
		- Dana	Rp.	57.951.000,00	49.590.000,00	85,57	
		Keluaran :					
		1. Arsip yang disusutkan	boks	300,00	300,00	100,00	
		Hasil :					
		Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran					
		Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program)					91,65
		Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program)					100,00
3.00.05.18	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah						
3.00.05.3.00.05.01.18.001	Pendaftaran wajib pajak daerah	Masukan :					
		- Dana	Rp.	222.190.000,00	218.647.000,00	98,41	
		Keluaran :					
		1. Wajib pajak baru	WP	550,00	691,00	125,64	
		Hasil :					
		Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran					125,64
3.00.05.3.00.05.01.18.007	Penetapan pajak	Masukan :					
		- Dana	Rp.	152.985.600,00	152.936.000,00	99,97	
		Keluaran :					
		1. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)	Ketetapan	22.750,00	26.064,00	114,57	
		Hasil :					
		Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran					114,57
3.00.05.3.00.05.01.18.010	Penagihan Pajak daerah	Masukan :					
		- Dana	Rp.	718.560.000,00	671.443.000,00	93,44	
		Keluaran :					
		1. Pajak daerah yang tertagih	jenis	10,00	10,00	100,00	
		2. Laporan penerimaan dan tunggakan pajak daerah	dokumen	12,00	12,00	100,00	
		3. Laporan rekonsiliasi data penerimaan pajak daerah	dokumen (BA)	12,00	12,00	100,00	
		4. Draft SK Bupati Alokasi dan bagi Hasil Pajak Daerah dan retribusi daerah	SK Bupati	3,00	3,00	100,00	
		Hasil :					
		Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran					100,00
3.00.05.3.00.05.01.18.015	Evaluasi PAD	Masukan :					
		- Dana	Rp.	247.683.000,00	160.340.500,00	64,74	
		Keluaran :					
		1. Evaluasi penerimaan PAD	Dokumen	12,00	12,00	100,00	
		Hasil :					
		Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran					100,00
3.00.05.3.00.05.01.18.035	Pengelolaan sistem informasi pajak Sleman (SIMPAMAN)	Masukan :					
		- Dana	Rp.	187.846.000,00	119.265.000,00	63,49	
		Keluaran :					
		1. Laporan data Wajib Pajak	jenis	6,00	6,00	100,00	
		2. Pelayanan Wajib Pajak	bulan	12,00	12,00	100,00	
		Hasil :					
		Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran					100,00
3.00.05.3.00.05.01.18.036	Penyampaian SPPT PBB	Masukan :					
		- Dana	Rp.	1.506.078.000,00	1.451.076.650,00	96,35	
		Keluaran :					
		1. Cetak SPPT PBB-2	SPPT	620.000,00	620.000,00	100,00	
		2. Verifikasi SPPT PBB-P2	SPPT	620.000,00	620.000,00	100,00	
		3. Penyampaian SPPT PBB-P2 yang diterbitkan secara masal	SPPT	620.000,00	620.000,00	100,00	
		4. Pemantauan dan Evaluasi penyampaian SPPT PBB-P2	kali	12,00	12,00	100,00	
		Hasil :					
		Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran					100,00
3.00.05.3.00.05.01.18.044	Pelayanan permohonan keringanan pajak daerah	Masukan :					
		- Dana	Rp.	133.964.400,00	127.577.500,00	95,23	
		Keluaran :					
		1. SK keberatan, pengurangan, keringanan, penghapusan, sanksi administrasi pajak daerah	SK	500,00	485,00	97,00	
		Hasil :					
		Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran					97,00
3.00.05.3.00.05.01.18.045	Penagihan PBB	Masukan :					
		- Dana	Rp.	7.066.332.500,00	6.931.695.250,00	98,09	
		Keluaran :					
		1. PBB P2 th 2017 Terbayar	%	75,00	75,00	100,00	

Kode	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana	Realisasi	Prosentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian	Nilai Capaian Program/ Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		2. Rekonsiliasi PBB	bulan	12,00	12,00	100,00		
		3. Penyampaian hadiah lunas awal	kali	2,00	2,00	100,00		
		4. Pembinaan petugas PBB	kali	1,00	1,00	100,00		
		Hasil :						
		Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran						
3.00.05.3.00.05.01.18.047	Penelitian SSPD dan BPHTB	Masukan :						
		- Dana	Rp.	451.734.000,00	439.702.501,00	97,34		
		Keluaran :						
		1. Validasi SSPD BPHTB	Objek Pajak	12.500,00	15.270,00	122,16		
		Hasil :						
		Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran						122,16
3.00.05.3.00.05.01.18.049	Pendampingan intensifikasi PPh OPDN	Masukan :						
		- Dana	Rp.	170.521.500,00	126.900.000,00	74,42		
		Keluaran :						
		1. Bagi hasil DPH OPDN		47.750.000.000,00	47.750.000.000,00	100,00		
		Hasil :						
		Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran						100,00
3.00.05.3.00.05.01.18.052	Penyenggaraan Administrasi PBB	Masukan :						
		- Dana	Rp.	1.204.860.000,00	1.200.383.500,00	99,63		
		Keluaran :						
		1. Analisis data PBB P2	dokumen	1,00	1,00	100,00		
		2. SK NJOP PBB	dokumen	1,00	1,00	100,00		
		3. Administrasi PBB	dokumen	86,00	86,00	100,00		
		Hasil :						
		Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran						100,00
3.00.05.3.00.05.01.18.057	Pemutakhiran data subyek pajak dan obyek pajak	Masukan :						
		- Dana	Rp.	3.594.894.000,00	3.527.382.500,00	98,12		
		Keluaran :						
		1. Pemutakhiran data PBB	OP	20.000,00	29.556,00	147,78		
		2. Aplikasi zona nilai tanah	paket	1,00	0,00	0,00		
		Hasil :						
		Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran						73,89
3.00.05.3.00.05.01.18.059	Pemanfaatan dan publikasi sarana dan prasarana olahraga	Masukan :						
		- Dana	Rp.	181.012.000,00	123.421.500,00	68,18		
		Keluaran :						
		1. Publikasi dan pemasaran sarana dan prasarana olahraga melalui media	jenis	6,00	5,00	83,33		
		Hasil :						
		Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran						83,33
3.00.05.3.00.05.01.18.060	Pemeriksaan Wajib Pajak Daerah	Masukan :						
		- Dana	Rp.	257.954.000,00	250.935.500,00	97,28		
		Keluaran :						
		1. Dokumen pemeriksaan WP dan dokumen pemeriksaan KAP	LHP	40,00	44,00	110,00		
		Hasil :						
		Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran						110,00
3.00.05.3.00.05.01.18.061	Pendataan, pemantauan dan pembinaan Wajib Pajak Daerah	Masukan :						
		- Dana	Rp.	351.982.500,00	348.606.000,00	99,04		
		Keluaran :						
		1. Verifikasi SPTPD		25,00	25,00	100,00		
		2. Pemantauan WP	kali	234,00	234,00	100,00		
		3. Pembinaan WP	kali	96,00	96,00	100,00		
		Hasil :						
		Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran						100,00
3.00.05.3.00.05.01.18.063	Kajian potensi pendapatan daerah	Masukan :						
		- Dana	Rp.	98.273.000,00	53.252.500,00	54,19		
		Keluaran :						
		1. Kajian potensi pajak/retribusi daerah	kajian	2,00	2,00	100,00		
		Hasil :						
		Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran						100,00
3.00.05.3.00.05.01.18.064	Pengelolaan Sarana Prasarana Olahraga	Masukan :						
		- Dana	Rp.	3.676.880.000,00	3.313.249.797,00	90,11		
		Keluaran :						
		1. Pemeliharaan sarana olahraga	sarana olahraga	4,00	3,80	95,00		
		Hasil :						
		Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran						95,00
		Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program)					95,02	
		Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program)						101,27

Kode	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana	Realisasi	Prosentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian	Nilai Capaian Program/Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02.10.19	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi						
1.02.10.3.00.05.01.19.003	Pengelolaan Sistem Informasi Penggajian	<i>Masukan :</i>					100,00
		- Dana	Rp.	115.467.000,00	114.568.500,00	99,22	
		<i>Keluaran :</i>					
		1. Peremajaan data gaji	PNS	9.806,00	9.806,00	100,00	
		2. Pencetakan daftar gaji	set	130,00	130,00	100,00	
		3. Dokumen rekapitulasi kenaikan gaji berkala PNS	SKPD	49,00	49,00	100,00	
		<i>Hasil :</i>					
		Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran					100,00
		Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program)					99,22
		Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program)					100,00
3.00.04.19	Program perencanaan pembangunan ekonomi						
3.00.04.3.00.05.01.19.025	Perencanaan Pengembangan Investasi	<i>Masukan :</i>					100,00
		- Dana	Rp.	48.337.000,00	46.883.000,00	96,99	
		<i>Keluaran :</i>					
		1. Analisis penyertaan modal kepada PT. BPD DIY	dokumen	1,00	1,00	100,00	
		2. Dokumen draft Raperda Perubahan Perda Penyertaan Modal PT. BPD DIY	dokumen	1,00	1,00	100,00	
		3. Kajian BPR Syariah	dokumen	1,00	1,00	100,00	
		<i>Hasil :</i>					
		Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran					100,00
		Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program)					96,99
		Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program)					100,00
3.00.01.20	Program peningkatan kualitas pelayanan publik						
3.00.01.3.00.05.01.20.079	Pembinaan kinerja kelembagaan PPK-BLUD	<i>Masukan :</i>					100,00
		- Dana	Rp.	101.185.000,00	97.639.272,83	96,50	
		<i>Keluaran :</i>					
		1. Pembinaan BLUD dan UPT BLUD	BLUD	27,00	27,00	100,00	
		2. Pembinaan Pengelola BLUD	kali	2,00	2,00	100,00	
		<i>Hasil :</i>					
		Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran					100,00
3.00.01.3.00.05.01.20.085	Pelayanan pemanfaatan aset daerah	<i>Masukan :</i>					100,00
		- Dana	Rp.	83.172.600,00	72.549.348,00	87,23	
		<i>Keluaran :</i>					
		1. Peminjaman : Gedung, Lapangan dan Bus Pemda	Unit	5,00	5,00	100,00	
		<i>Hasil :</i>					
		Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran					100,00
		Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program)					92,31
		Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program)					100,00
		Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Instansi)					85,80
		Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Instansi)					99,02